

"STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGATASI KONFLIK BUDAYA DI DESA FADORO FULOLO KEC. LOTU KAB. NIAS UTARA"

by Zebua Fransiska Septania

Submission date: 07-Nov-2023 08:54PM (UTC-0500)

Submission ID: 2221192542

File name: Skripsi-2.docx (347.93K)

Word count: 17561

Character count: 116953

**STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGATASI
KONFLIK BUDAYA DI DESA FADORO FULOLO
KEC. LOTU KAB. NIAS UTARA**

SKRIPSI



Oleh:

FRANSISKA SEPTANIA ZEBUA

NIM : 2319196

Diajukan kepada :

PROGRAM STUDI S1- MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2023

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, karena hanya karena kasih dan kemurahannya, penulis telah dapat mempersembahkan penulisan proposal penelitian ini dengan judul “Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Konflik Budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab.Nias Utara”. Namun demikian penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan di sana sini dalam penulisan proposal ini dan penulis harapkan nantinya akan mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan penulisan karya ilmiah ini. Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam penyusunan proposal penelitian ini, proposal penelitian ini tidak akan pernah tersusun. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S. Pt., M. Si sebagai Pj. Rektor Universitas Nias
2. Ibu Maria Magdalena Batee, SE., M.M. sebagai Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias.
3. Bapak Yupiter Mendrofa, SE., M.M sebagai Plt. Ketua Program Studi Manajemen S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Nias.
4. Bapak Dr. Ayler Beniah Ndraha, S.STP., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta waktu dan tenaga dalam penentuan judul dan penyusunan proposal penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Administrasi yang telah memberikan bekal ilmu bagi penulis sejak awal menempuh perkuliahan.
6. Keluarga tercinta; Papa, mama dan abang/kakak, Adek-adek tercinta yang telah banyak memberikan dukungan doa, moril maupun material yang sangat penulis butuhkan dalam menyusun proposal penelitian ini.

7. Kepada semua pihak yang telah ikut membantu penulis, yang tidak dapat penulis saatu persatu, penulis mengucapkan terima kasih dan kiranya kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Gunungsitoli, Juli 2023

Penulis,

FRANSISKA SEPTANIA ZEBUA

NIM. 2319196

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian	6
1.5.1 Manfaat teoritis	6
1.5.2 Manfaat praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Strategi	7
2.1.1 Pengertian strategi	7
2.1.2 Karakteristik Strategi.....	8
2.1.3 Jenis Strategi	9
2.2 Defenisi Pemerintahan Desa	10
2.2.1 Regulasi Desa	11
2.3 Konflik	11
2.3.1 Pengertian Konflik	11
2.3.2 Faktor Terjadinya Konflik.....	12
2.3.3 Jenis Konflik	13
2.3.4 Gejala- Gejala Konflik	13
2.3.5 Indikator Konflik	13
2.4 Penelitian Terdahulu	14
2.5 Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25

3.2	Variabel Penelitian	26
3.3	Lokasi dan Jadwal Penelitian	26
3.4	Sumber Data	28
3.5	Instrumen Penelitian	30
3.6	Teknik Pengumpulan Data	30
3.7	Teknik Analisis Data	31
	DAFTAR PUSTAKA	33
	LAMPIRAN.....	36

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

1. Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	24
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
1. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2. Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	27
3. Tabel 3.2 Data Informan.....	29

DAFTAR WAWANCARA

Halaman

Daftar Wawancara..... 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan datang atau jangka waktu panjang, selain itu organisasi harus senantiasa selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar dimana strategi itu akan di laksanakan, sehingga strategi yang di buat tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan atau bisa disebut searah dengan lingkungan sasaran strategi, dan juga melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya.

Defenisi Umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Jadi strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Dalam setiap kehidupan sosial sering terjadi konflik sosial, konflik senantiasa melekat pada setiap orang. Oleh karena itu konflik selalu terjadi, baik dalam lingkup kecil dan sederhana seperti keluarga, tetangga, teman sepermainan, kelompok orgnisasi atau instansi, maupun pada lingkup yang lebih besar seperti pada setiap komunitas, masyarakat, negara sampai pada hubungan internasional. Masalah konflik di Desa merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian masyarakat karna pada umumnya konflik dilakukan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, perbuatan dan bahkan perbedaan tingkah laku dari masing- masing kebudayaan mereka.

Menurut (Rettobjaan 2019) konflik diartikan sebagai percekcoakan, perselisihan atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial dimana masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak

lain demi mencapai tujuannya dengan cara memberikan perlawanan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik adalah hal yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang timbul akibat kesalahpahaman interpersonal maupun kelompok satu dengan kelompok yang lainnya yang didasarkan pada kepentingan pribadi maupun kelompok. Konflik tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia pasti memiliki konflik. Didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Manusia adalah makhluk konfliktis (*homo conflictus*) yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Konflik atau pertikaian dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dihindari.

Sedangkan konflik menurut Rivai dan Mulyadi (2022:929) adalah “suasana batin yang berisi kegelisahan dan pertentangan antara dua motif atau lebih yang mendorong seseorang untuk melakukan dua atau lebih kegiatan yang saling bertentangan, bila tidak dikendalikan secara baik akan menimbulkan dampak negatif yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan di antara organisasi”.

Menurut dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah keadaan dimana terjadi perbedaan kepentingan yang kemudian salah satu pihak melakukan pertentangan ataupun menghalangi tindakan pihak lain sehingga apabila tidak dikendalikan dengan baik akan menimbulkan perpecahan.

Desa Fadoro Fulolo terletak di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini terkenal dengan keberagaman budaya dan organisasi yang beragam, seperti kelompok adat, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah yang masuk ke desa untuk memberikan bantuan. Namun keberagaman ini juga dapat menyebabkan konflik budaya di desa, di mana kelompok-kelompok tersebut memiliki perbedaan dalam nilai, adat istiadat, dan cara hidup. Konflik budaya ini dapat memperburuk keadaan dan mengancam harmoni di desa.

Konflik budaya merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Konflik antar budaya dapat diartikan sebagai konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap identitas satu kelompok pendukung kebudayaan tertentu

terhadap pendukung kebudayaan yang lain dan sistem pendistribusian sumber daya tertentu.

Beberapa penelitian lain mengenai Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Konflik Budaya yang telah dilakukan dan telah menjadi sumbangan referensi ilmiah mengenai penelitian-penelitian tersebut. Di antara peneliti-peneliti tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) dengan judul: “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kenyataan pada birokrasi pemerintahan, khususnya pemerintahan di daerah bahwa pelayanan publik belum mencapai hasil yang efektif. Hal ini diasumsikan sebagai akibat dari kinerja pelayanan belum maksimal, terutama pada aspek perilaku dan sikap aparatur pemerintah yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugasnya. Aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masih banyak yang memandang isu tentang etika birokrasi, yaitu masalah moralitas sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Elmina Arofah (2020) dengan judul penelitian: “Strategi Pemecahan Masalah Konflik Sosial Akibat Pembangunan Waduk Jatigede”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek pembangunan waduk jatigede merupakan proyek Pemerintah Pusat, segala sesuatunya mulai dari tahap perencanaan sampai penanganan konflik yang muncul akibat pembangunan proyek menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, sebab dalam proyek pembangunan pusat, Pemerintah Pusatlah yang menjadi motor utamanya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, Pemerintah Pusat cenderung mengabaikan konflik yang muncul dan tidak tanggap dalam menyelesaikannya.

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian tentang Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Konflik Budaya ini belum pernah diteliti sebelumnya. Namun konsep dari penelitian terdahulu yang juga menganalisis tentang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Strategi Pemecahan Masalah Konflik Sosial diharapkan mampu menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan penelitiannya mengenai Strategi Pemerintahan Desa Dalam

Mengatasi Konflik Budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab.Nias Utara agar nantinya penulis mampu untuk melihat hasil dari sudut pandang yang berbeda.

Berdasarkan hasil observasi awal beberapa masalah yang muncul terkait dengan konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo yang perlu diatasi oleh pemerintahan desa dalam upaya membangun harmoni dalam keberagaman organisasi yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut, yang pertama perbedaan nilai dan norma, Desa Fadoro Fulolo merupakan desa yang terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa yang memiliki perbedaan nilai dan norma. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan dan prinsip yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan seperti agama, keadilan, dan sosial. Perbedaan dalam nilai dan norma ini bisa menjadi sumber ketidaksepahaman dan konflik di antara anggota masyarakat. Yang kedua persaingan sumber daya, konflik budaya yang berakibat persaingan dalam penggunaan sumber daya yang terbatas di desa. Misalnya, persaingan dalam pemanfaatan lahan pertanian, air, atau infrastruktur publik dapat memunculkan ketegangan dan perselisihan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda terkait permasalahan pada masyarakat desa. Yang ketiga komunikasi yang tidak efektif, perbedaan bahasa dan komunikasi yang tidak efektif dapat menjadi penghalang dalam memahami dan memecahkan masalah yang timbul. Kurangnya pemahaman dan kesalahpahaman dalam komunikasi antar kelompok dapat memperburuk konflik budaya di desa. Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi yang efektif antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Yang keempat diskriminasi dan ketidakadilan adanya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam konteks konflik budaya. Diskriminasi berbasis budaya seperti perlakuan tidak adil, penindasan, atau pengekangan hak-hak kelompok minoritas bisa memperburuk konflik budaya dan menghambat pembangunan harmoni dalam keberagaman. Yang kelima adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran tentang keberagaman budaya dapat menjadi faktor pendorong konflik budaya. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dapat memperbesar

kesenjangan dan memicu konflik di desa. Dan yang keenam keterbatasan sumber daya pemerintahan desa menghadapi keterbatasan sumber daya dalam mengatasi konflik budaya. Terbatasnya anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi dialog, pelatihan, atau kegiatan rekonsiliasi dapat menjadi hambatan dalam mencapai harmoni dalam keberagaman. Permasalahan yang terkait dalam pemerintahan Desa.

Dalam mengatasi masalah- masalah ini, pemerintahan desa perlu mengembangkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Strategi-strategi tersebut perlu memperhatikan pendekatan dialog, edukasi, peningkatan kesadaran, dan membangun saluran komunikasi yang efektif untuk memperkuat hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda dan mengatasi konflik budaya yang muncul.

Pemerintahan desa Fadoro Fulolo memiliki peran penting dan cara dalam mengatasi konflik budaya dan membangun harmoni dalam keberagaman organisasi. Namun strategi yang tepat dalam mengatasi konflik budaya di desa tersebut masih menjadi tantangan, maka berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik mengangkat judul “Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Konflik Budaya Di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara”. Yang bertujuan untuk membantu pemerintahan desa Fadoro Fulolo dalam meningkatkan harmoni dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat desa, serta memastikan bahwa desa Fadoro Fulolo dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan harmonis.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang dijadikan bahan penelitian yaitu “ Minimnya keharmonisan di antara masyarakat desa di Desa fadoro Fulolo sehingga menyebabkan terjadi konflik”.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Pemerintahan Desa dalam mengatasi konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu kab. Nias Utara ?
2. Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara ?
3. Bagaimana strategi Pemerintahan Desa dalam mengatasi terjadinya konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui peran Pemerintahan Desa dalam mengatasi konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu kab. Nias Utara.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara.
3. Untuk mengetahui startegi Pemerintahan Desa dalam mengatasi terjadinya konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
2. Penelitian dapat dijadikan bahan kajian serta dasar untuk penelitian selanjutnya, terutama yang tertarik untuk membahas lebih jauh lagi tentang Membangun Harmoni dalam Keberagaman Organisasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pertimbangan untuk di jadikan bahan evaluasi bagi Pemerintahan Desa dalam mengatasi Konflik Budaya.
2. Memberikan masukan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat bahwa jika terjadinya konflik budaya tidak adanya harmonisasi dalam suatu desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi dalam definisi umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan dalam definisi Khusus Strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti, perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Jadi strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Strategi menurut Salusu (2019:101), yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

Pengertian strategi dalam (Nippi & M, 2019) bahwa “Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling hubungan dalam hal waktu dan ukuran”. Sedangkan definisi strategi

menurut Ireland, et al. dalam Yunita, Linda Desma dan Tri Handayani (2018:20) merupakan serangkaian komitmen, tindakan terpadu dan terkoordinasi yang dirancang untuk mengeksploitasi kompetensi inti guna mendapatkan keunggulan kompetitif.

Dari pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah proses penentuan rencana, merangkai komitmen, pergerakan kompetitif, pendekatan bisnis dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

2.1.2 Karakteristik Strategi

Strategi memiliki karakteristik yang bersifat jangka panjang dan dinamis, berkaitan erat dengan manajemen operasional, selalu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak, berorientasi masa depan, dan dalam pelaksanaannya didukung oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Proses strategi terdiri atas tiga tahap (Eddy Yunus, 2019) :

1. Formulasi strategi, antara lain adalah mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.
2. Implementasi strategi, diantaranya mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan.
3. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan.

2.1.3 Jenis Strategi

Menurut David (2019) Matriks Swot adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi: Strategi SO (kekuatan-peluang), Strategi WO (kelemahan-peluang), Strategi ST (kekuatan ancaman), dan Strategi WT (kelemahan-ancaman). Dari keempat jenis strategi tersebut ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan antara lain :

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan adalah sesuatu yang dapat diandalkan atau diunggulkan oleh instansi atau organisasi tersebut contohnya keunggulan dalam produk yang dapat diandalkan, memiliki inovasi dan berbeda dengan produk lain. sehingga dapat membuat lebih kuat dari para pesaingnya. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya yang ada pada perusahaan baik itu keterampilan atau kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi. Keterbatasan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, dan citra merek dapat merupakan sumber kelemahan.

3. Peluang (Opportunity)

Peluang adalah berbagai hal atau suatu kondisi yang menguntungkan bagi suatu perusahaan, serta kecenderungan- kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang. Menganalisis suatu peluang, keadaan dan kondisi yang merupakan peluang yang ada diluar suatu organisasi atau instansi dan juga memberikan peluang berkembang bagi instansi organisasi dimasa depan. Hal ini adalah untuk menemukan atau mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu

perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang di masa yang akan depan atau masa yang akan datang.

4. Ancaman (Treats)

Ancaman merupakan hal-hal yang diluar lingkungan yang tidak menguntungkan dalam organisasi jika tidak dapat diatasi maka akan menjadi hambatan bagi organisasi yang bersangkutan baik masa sekarang maupun yang akan datang. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi perusahaan. Adanya atau banyaknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan.

2.2 Defenisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah suatu organisasi terendah Pemerintah RI yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa

diantaranya menurut Roucek dan Warren dalam Sirimasa, Novisto, dkk (2018:5) mengemukakan pengertian desa yaitu: desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladangladang yang berserak dan di kampungkampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Sedangkan menurut Widjaja dalam Pongantung, Maria Christina, dkk (2021:81) mengemukakan: Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

2.2.1 Regulasi Desa

1. Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 26 tentang desa bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan kewajiban kepala desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014.
2. Permendagri No. 106 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis balai pemerintahan desa kementerian dalam negeri.

2.3 Konflik

2.3.1 Pengertian Konflik

Menurut (Rettobjaan 2019) konflik diartikan sebagai percekocan, perselisihan atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial dimana masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain demi mencapai tujuannya dengan cara memberikan perlawanan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik adalah hal yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang timbul akibat kesalahpahaman interpersonal maupun kelompok satu dengan kelompok yang lainnya yang didasarkan pada kepentingan pribadi maupun kelompok. Konflik tidak bisa dihindarkan dalam

kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia pasti memiliki konflik. Didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Kemudian Wibowo (2019:220) menjelaskan bahwa sejatinya konflik adalah proses atau hasil interaksi dimana pihak pertama merasa bahwa kepentingannya ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lainnya.

2.3.2 Faktor Terjadinya Konflik

Konflik Tingkah laku tergantung yakni salah satu pihak akan menyesuaikan tingkah lakunya dan akan tergantung kepada pihak lain yang akan dianggap lebih pintar, lebih tua, atau lebih mampu (Ali Alatas, 2018). Konflik yang terjadi di tengah masyarakat di sebabkan oleh beberapa hal, faktor- faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

1. Salah pengertian atau salah paham karena kegagalan komunikasi. Komunikasi yang gagal membuat isi berita atas pesan tidak lengkap dan tidak jelas, lengkap dan jelas tetapi tidak sampai pada si penerima dengan baik dan tepat pada waktunya, sampai dengan baik dan tepat pada waktunya tetapi tidak diterima dan ditangkap utuh.
2. Perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dipegang. Tindakan dan langkah-langkah yang diambil berbeda; cara kerja dan irama kerja berbeda; dan waktu serta perlengkapan kerja yang berbeda.
3. Rebutan dan persaingan dalam hal yang terbatas seperti fasilitas kerja, jabatan.
4. Masalah wewenang dan tanggung jawab.
5. Penafsiran yang berbeda atas satu hal. Dengan penafsiran berbeda orang lalu berdebat, dan dari perdebatan yang sempit, lahirlah hubungan yang tidak baik, lalu timbul konflik.
6. Pelecehan pribadi dan kedudukan. Orang yang merasa dilecehkan dan diinjak harga dirinya akan melawan orang yang melecehkan dan siap berkonflik dengannya.

2.3.3 Jenis Konflik

Ada beberapa jenis konflik masyarakat berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia antara lain yaitu

1. Konflik sosial, konflik yang sering terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik.
2. Konflik politik, konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan.
3. Konflik ekonomi, konflik yang terjadi karena adanya masalah perkonomian
4. Konflik budaya, konflik yang terjadi karena adanya kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik.
5. Konflik ideology, terjadi karena adanya perbedaan pemahaman yang kini seseorang atau sekelompok orang.

2.3.4 Gejala- Gejala Konflik

Gejala-gejala konflik menurut Ali Alatas (2018) adapun gejala-gejala konflik yaitu:

1. Bersifat jelas, seperti pertengkaran biasa atau perkelahian
2. Samar-samar, seperti suasana yang terasa hening atau terlalu tenang
3. Aktif, seperti kata-kata marah atau surat bernada keras
4. Pasif, seperti tidak saling bertegur sapa.

2.3.5 Indikator Konflik

Menurut Fitriana (2019:192) indikator konflik adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan komunikasi

Apabila seseorang atau lebih menerima informasi yang berbeda atau tidak sama dengan sumber informasi sehingga terjadi perbedaan mendasar dalam mempersepsikan isi dari persepsi tersebut.

2. Perbedaan tujuan

Apabila seseorang atau lebih memiliki ketidaksamaan dalam memandang tujuan-tujuan yang hendak dicapai sehingga terjadi pertentangan dalam menyikapi tujuan-tujuan tersebut.

3. Perbedaan dalam penilaian atau persepsi
Perbedaan dalam penilaian antara anggota dalam suatu organisasi, seringkali disertai oleh perbedaan-perbedaan dalam sikap, ketidaksesuaian nilai, persepsi, yang juga dapat menimbulkan konflik kerja.
4. Interdependensi aktivitas kerja
Terdapat adanya interdependensi kerja, apabila seseorang atau lebih saling tergantung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Konflik akan terjadi apabila seseorang dari mereka diberi tugas secara berlebihan dan apabila salah seorang karyawan atau lebih harus menunggu atau menggantungkan pekerjaannya kepada karyawan lain.
5. Kesalahan dalam afeksi
Apabila seseorang memperlakukan rekan kerjanya menjadi tidak nyaman dalam bekerja, terutama dalam hal perasaan atau suasana hatinya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya sebagai panduan untuk penelitian ini. Dalam hal teori dan konsep, penelitian sebelumnya telah membantu penulis merancang penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ayler Beniah Ndraha, dkk	2018	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Di	Tantangan bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa karena di perhadapkan dengan

			Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara	menurunnya nilai gotong royong di antara masyarakat desa yang akan berengaruh terhadap angka partisipasi masyarakat desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini bisa saja disebabkan oleh lemahnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui pemerintahan desa.
2	Muh. Asdarfian	2022	Peran Pemerintahan Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Kelompok di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara	¹ Konflik horizontal yang sering terjadi di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, timbul bukan karena konflik antar etnis (suku) ataupun agama, akan tetapi konflik bermula akibat adanya sentimen dan fanatik yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda desa setempat. Penanganan konflik yang melibatkan ¹ aparat pemerintah daerah maupun tokoh-

				<p>tokoh yan ada di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dirasa belum maksimal, hal ini bisa di lihat dari gagalnya mediasi yang dilakukan sehingga menimbulkan eskalasi konflik makin luas.</p>
3	<p>¹ Nurul Hafifa</p>	2018	<p>Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara Kelurahan Kambiolangi Dengan Kelurahan Salubarani Di Perbatasan Kabupaten Enrekang– Kabupaten Tana Toraja</p>	<p>¹ Dengan harapan tidak ada lagi sikap menduga-duga dari masyarakat pada umumnya mengenai apakah pemerintah kelurahan Kambiolangi dan kelurahan Salubarani bersama Pemerintah Kabupaten Enrekang-Tana Toraja mengambil sikap dan berperan menanggulangi kasus yang terjadi. Lemahnya peran institusi pemerintah dalam mengambil langkah dalam beberapa penyelesaian konflik terus berulang terlontar ketika kecelakaan sosial ini kembali muncul dipermukaan. Perkelahian antar</p>

				kelurahan setiap saat bisa saja terjadi dengan berbagai potensi yang diredam untuk beberapa saat saja. Ketika keran penyebab perkelahian itu terbuka, sontak massa pun kembali mengambil posisi dalam menyelesaikan persoalan yang sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan bahasa verbal.
4	¹ Nur Ilma Wati. D	2020	Kesadaran Multikultural Terhadap Konflik Mahasiswa Melalui Pendekatan Etnopedagogi (Studi Kasus Terhadap Mahasiswaunismuh Makassar)	¹ Konflik sosial yang melibatkan tindak kekerasan massa yang terkadang disebabkan atau dipicu oleh persoalan-persoalan sepele. Begitupun dengan dunia kampus, hampir disetiap demonstrasi yang terjadi selalu berakhir dengan anarkis dan kericuhan yang menyebabkan jatuhnya korban, kerusakan fasilitas umum dan harta benda. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan massa terhadap (tersangka) pelaku tindak

				<p>kriminal juga kian menjadi peristiwa yang biasa terjadi dimana-mana, termasuk di Universitas Muhammadiyah Makassar. Eskalasi kekerasan antar kelompok mahasiswa yang berbeda latar belakang marak terjadi. Beragam model konflik yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal seolah-olah tidak ada habisnya.</p>
5	<p>⁵ Suci Ramadhanti</p>	2021	<p>Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupetan Bima</p>	<p>⁵ Konflik sosial juga terjadi dikarenakan kenakalan remaja, sering kali terjadi kenakalan remaja ditiap wilayah salah satunya di Desa Kalampa kecemata woha kabupaten bima. Kenakalan yang mereka lakukan seperti perkelahian/pertikaian, satu orang yang melakukannya maka semua orang akan kena, itulah yang membuat sebuah konflik menjadi besar dan melibatkan satu</p>

				<p>desa terlibat. Yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu masalah minuman yang beralkohol sehingga memicu timbulnya konflik yang tidak terelakan. Dan hal ini dipicu oleh masyarakat dan pemuda yang kurang beraktivitas dan banyak menghabiskan waktu untuk berkumpul-kumpul bersama teman-teman mereka.</p>
6	<p>Irfan Nopandi Ismail, Muhammad Rais Rahmat Razak</p>	2020	<p>¹³ Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang</p>	<p>¹³ Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, berdasarkan hasil observasi yang pada tanggal 10 February 2019 diperoleh data dari petugas pencatatan laporan atas nama Rahmawati, bahwa di desa Cemba sering terjadi kasus sengketa tanah. Terbukti dalam tahun 2014 telah terjadi kasus sengketa tanah sebanyak tiga kasus. Salah satu kasus sengketa tanah</p>

				tersebut tidak dapat di selesaikan dalam lingkup pemerintahan desa Cemba dan diserahkan untuk dibahas selanjutnya di tingkat kecamatan karena tidak ditemukannya kesepekatan antara kedua belah pihak.
7	Candra Kirana	2022	Peran Kepala Desa dalam Menangani Konflik Sosial di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima	Konflik yang pernah terjadi di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Konflik sesama warga konflik terjadi pada tanggal 23 september 2019 konflik ini terjadi karena kesalah pahaman. Dimana terjadinya konflik sosial di desa tersebut yaitu konflik antar warga dan konflik antar remaja. Dalam masalah atau konflik sosial yang terjadi di masyarakat kepala desa sie berperan untuk menangani masalah tersebut agar maslah dapat diselesaikan dengan baik
8	Desmiyati	2020	Proses Penyelesaian	Keuchik dan perangkat Gampong sudah

			<p>10</p> <p>Konflik Antar Gampong Melalui Pendekatan Local Wisdom (Kearifan Lokal)</p>	<p>10</p> <p>menjalankan tugasnya, namun demikian perselisihan antar dua Gampong itu hanya berhenti sesaat. Konflik antar Gampong masih juga terjadi. Namun setelah seminggu bergelut dengan konflik antar Gampong yang memakan korban akhirnya dua Gampong ini berdamai dan berjanji tidak akan ada bentrok lagi antara Gampong Belukur makmur dan Lae Mate, dan apa bila ada yang memulai lagi dan melanggar perjanjian ini akan dibawa ke jalur hukum, yang di dalam perjanjian itu sudah disepakati kedua belah pihak Gampong. 10 Penyelesaian ini, melibatkan aparatur Gampong masing-masing menurut adat setempat .</p>
9	Kusman	2021	Strategi Penyelesaian Konflik Sosial	Yang sering terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten

			Terhadap Pesta Demokrasi Di Kabupaten Bulukumba	Bulukumba, yang seringkali memunculkan konflik. Konflik yang biasa disebabkan oleh beberapa factor baik dari dalam maupun dari luar diantaranya; calon tim sukses, keluarga, organisasi, praktik politik. Massa dapat dikerahkan dengan sedikit imbalan sehingga pola hubungan diantara aktor utama dan aktor pendukung sifatnya cenderung loyalis, mobilisasi sementara pihak elite cenderung berperilaku manipulatif atas massa pendukungnya.
10	Johni Najwan	2019	Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya	Dalam dua dekade terakhir ini, berbagai kasus konflik yang disebabkan oleh multi budaya semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Berbagai kasus konflik seperti: di Aceh, Timika (Papua), Ambon (Maluku),

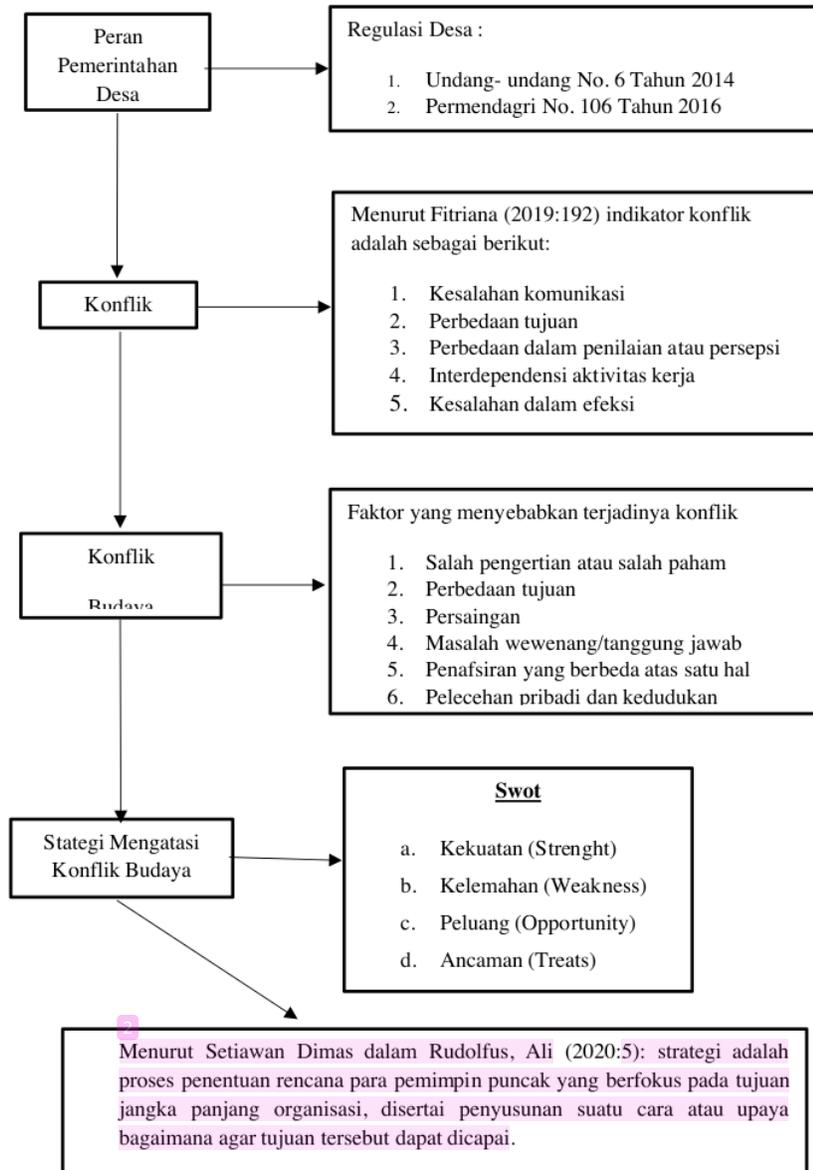
				<p>Pontianak (Kalimantan Barat), Sampit-Mataram (NTB) dan Poso (Sulawesi Tengah) adalah merupakan berbagai contoh kasus konflik yang disebabkan oleh pertikaian antar etnis komunitas agama, dan/atau antar golongan yang terjadi di berbagai kawasan di Indonesia.</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana upaya-upaya pemerintahan desa dalam mengatasi konflik-konflik budaya yang terjadi sehingga dapat terus berkembang dan membangun harmoni dalam kehidupan masyarakat. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga tidak ada kesalahan dalam data yang diambil. Kemudian peneliti dapat mendeskripsikan kerangka pemikiran penelitian, sebagai berikut :

Kerangka Berpikir

Gambar 2.1



Sumber : Olahan peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah riset yang memiliki karakter deskriptif dan lebih condong memakai analisis dalam prosesnya. Dimana arti atau sudut pandang dari subjek penelitian lebih diutamakan. Penelitian kualitatif dipakai untuk menghimpun informasi, wawasan, pengetahuan secara mendalam mengenai suatu masalah yang nantinya digunakan untuk memperoleh solusi dan gagasan atau ide baru.

Moleong dalam Sirimasa, Novista (2018:6) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (alamiah) tanpa adanya setting-setting. Adapun beberapa pendekatan penelitian dalam kualitatif itu adalah sebagai berikut :

1. Studi kasus di artikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkapkan kasus tersebut.
2. Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa sekarang.
3. Fenomenologi diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas maka jenis pendekatan kualitatif pada penelitian penulis ini adalah dengan pendekatan deskriptif.

3.2 Variabel Penelitian

Terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data dalam sebuah penelitian, menurut Sugiyono (2018:55), variabel adalah: "Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan."

Dalam penelitian, variabel penelitian mencakup segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dengan tujuan mendapatkan informasi tentang hal tersebut dan kemudian menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2018:57). Pada penelitian ini variabel penelitian adalah Strategi Pemerintahan Desa dalam Mengatasi Konflik Budaya. Ada pun yang menjadi indikator konflik menurut Fitriana (2019:192) adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan komunikasi
2. Perbedaan tujuan
3. Perbedaan dalam penilaian atau persepsi
4. Interdependensi aktivitas kerja
5. Kesalahan dalam efeksi

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Dengan menetapkan lokasi penelitian maka objek penelitian dan tujuan penelitian tentunya sudah tetap dan jelas. Sehingga dapat mempermudah proses dan dapat melakukan penelitian guna mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian ini di lakukan di Kantor Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara Jl. Gowezalawa No. 1 Desa Fadoro Fulolo. Berikut jadwal panduan yang telah disusun oleh peneliti, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Jadwal																										
	Maret 2023			April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				Sept 2023			
	2	3	4	1	2	2	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
Kegiatan Proposal Skripsi	■	■	■																								
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing				■	■	■	■	■	■	■	■																
Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi												■	■	■	■												
Persiapan Seminar																				■	■						
Seminar Proposal Skripsi																						■	■				
Persiapan Penelitian																										■	
Pengumpulan Data																											■
Penulisan Naskah Skripsi																											■

Tabel 3.2
Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	Itolo Harefa, SE	Pj. Kepala Desa Fadoro Fulolo
2	Aliusman Harefa	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
3	Sayafao Harefa	Sekretaris Desa
4	Yernawati Zega	Masyarakat Desa Fadoro Fulolo
5	Denorius Harefa	Masyarakat Desa Fadoro Fulolo
6	Agustinus Harefa	Masyarakat Desa Fadoro Fulolo
7	Mawarieli Harefa	Masyarakat Desa Fadoro Fulolo
8	Werni Zalukhu	Masyarakat Desa Fadoro Fulolo
9	Mesliana Lase	Masyarakat Desa Fadoro Fulolo
10	Efilman Harefa	Masyarakat Desa Fadoro Fulolo

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (V. Wiratna Sujarweni, 2018).

3.5 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:250) instrument penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. Dimana instrument penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dimana peneliti akan menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hamzah (2019) Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data-data yang bersifat deskriptif, yaitu data berupa tanda-tanda hasil wawancara atau observasi yang dikategorikan dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak dan catatan-catatan saat penelitian di lapangan.

Menurut Sugiyono (2019:65) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data nya adalah sebagai berikut :

1. Observasi, Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara.
2. Wawancara, Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil. Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti yang dilaksanakan secara tatap muka dengan Pj. Kepala Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Sekretaris Desa, dan Masyarakat Desa Fadoro Fulolo
3. Dokumentasi Menurut Hamzah (2019), Dokumen adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berasal dari dokumentasi. Sebagian

besar data laporan, artefak, foto, dan lainnya sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui kejadian yang pernah terjadi di masa silam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa bukti foto, buku catatan, hasil notulen rapat keputusan pimpinan dari kantor Desa Fadoro Fulolo.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Metode analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah deskriptif seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok (penting), mencari tema dan menentukan polanya. Data ini diperoleh di dalam lapangan yang ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan terperinci.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau hubungan antara kategori. Menurut Sugiyono (2018) juga menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari data yang diperoleh, kemudian di kategorikan, dicari tema dan polanya, lalu ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan yang dilakukan oleh sumber data secara langsung. Disini peneliti bersifat

perspektif emic yang artinya memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh sumber data itu sendiri. Berbeda dengan jenis penelitian yang lain, penelitian ini tanpa diawali oleh hipotesis dan kerangka teori secara ketat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2018) bahwa penelitian yang bersifat deskriptif tidak perlu merumuskan hipotesis.

DAFTAR PUSTAKA

- aAlatas, Ali. (2018). *Konflik Antar Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Studi terhadap Mahasiswa Syariah dan Saintek 2016)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ayler Beniah Ndraha, dkk. 2018. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Candra Kirana. 2022. *Skripsi Peran Kepala Desa dalam Menangani Konflik Sosial di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima*. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
- David, Fred R. 2019. *Manajemen Strategis Konsep*, Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Desmiyati. 2020. *Skripsi Proses Penyelesaian Konflik Antar Gampong Melalui Pendekatan Local Wisdom (Kearifan Lokal)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Elmina Arofah, dkk. 2020. *Judul dan topik Skripsi atas nama Elmina Arofah pada Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad*.
- Fitriana, Yudha Rahayu. 2019. *Persepsi Insentif Dengan Konflik Kerja Karyawan Perusahaan Roti Salwa Trenggalek*.
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang. Literasi Nusantara.
- Johni Najwan. *JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL. 16 OKTOBER 2019: 195 – 208*. Universitas Jambi
- Kusman. 2021. *Skripsi Strategi Penyelesaian Konflik Sosial Terhadap Pesta Demokrasi Di Kabupaten Bulukumba*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.

- Muh. Asdarfian. 2022. *Skripsi Peran Pemerintahan Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Kelompok di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nippi, A. T., & M, A. P. (2019). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru)*. Meraja Journal, 2(1), 35–47.
- Nur Ilma Wati. D. 2020. *Skripsi Kesadaran Multikultural Terhadap Konflik Mahasiswa Melalui Pendekatan Etnopedagogi (Studi Kasus Terhadap Mahasiswaunismuh Makassar)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurul Hafifah. 2018. *Skripsi Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara Kelurahan Kambiolangi Dengan Kelurahan Salubarani Di Perbatasan Kabupaten Enrekang– Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 47. Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Pongantung, Maria Christina, Salmin Dengo dan Rully Mambo. 2021. *Manajemen Strategis Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan*. JAP, 7 (103), 76-77.
- Rettobjaan, I. (2019). *Peranan Humas dalam Merespon Konflik Internal pada Universitas Sam Ratulangi Manado*. JURNAL ACTA DIURNA, 2(4).
- Rivai, V . & Mulyadi, D (2022). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Setiawan Dimas, *Defenisi Strategi*, Blog Setiawan Dimas, (15 Juni 2020).
- Suci Ramadhanti. 2021. *Skripsi Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupetan Bima*. Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram Mataram.

Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri No 47 Tahun 2016. Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Sekretariat Negara: Jakarta

Prof.Dr.Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Salusu. 2019. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, KOMBINASI, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi: Pendekatan kuantitatif*. Jakarta Selatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Permendagri Desa

Wahyuni. 2018. *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar*. UIN Alauddin Makassar, 14.

Wibowo. (2019). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Yunus, Eddy. (2019). *Manajemen Strategis*, Yogyakarta:

DAFTAR WAWANCARA

Kesalahan komunikasi

1. Apa yang menyebabkan kesalahan dalam berkomunikasi pada lingkungan masyarakat?
2. Menurut saudara bagaimana tindakan pemerintahan desa dalam mengatasi jika terjadinya kesalahan dalam berkomunikasi?
3. Seperti apa saja bentuk kesalahan komunikasi yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat sehingga terjadi sebuah konflik?
4. Menurut saudara hal- hal apa saja yang perlu di hindari dalam berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahan?
5. Faktor- faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesalahan dalam komunikasi?

Perbedaan tujuan

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan tujuan pada pemerintahan desa?
2. Seperti apa saja perbedaan tujuan yang pernah terjadi pada pemerintahan desa?
3. Apakah ketika terjadinya perbedaan tujuan pada pemerintahan desa, dapat memperlambat segala pekerjaan?
4. Apakah kepala desa telah melakukan upaya untuk menghindari perbedaan tujuan dalam organisasi?
5. Bagaimana upaya pemerintahan desa untuk mengatasi ketika adanya perbedaan tujuan pada masyarakat?

Perbedaan dalam penilaian atau persepsi

1. Apakah di dalam pemerintahan desa pernah terjadi perbedaan penilaian sehingga dapat menimbulkan konflik?
2. Apa saja tindakan- tindakan yang dilakukan kepala desa jika terjadinya perbedaan penilaian?
3. Menurut saudara apa saja penyebab terjadinya persepsi dalam penilaian?
4. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan penilaian terhadap masyarakat?
5. Bagaimana persepsi masyarakat desa ketika pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan pada masyarakat?

Interdependensi aktivitas kerja

1. Apakah pernah terjadi pada pemerintahan desa saling ketergantungan dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat menimbulkan konflik?
2. Apa tindakan yang dilakukan pemerintahan desa jika bawahannya saling ketergantungan dalam melaksanakan tugasnya masing- masing?
3. Menurut saudara apakah hambatan yang terjadi jika pemerintahan desa saling ketergantungan dalam melaksanakan tugasnya?
4. Apa saja resiko ketika terjadinya ketergantungan dalam melaksanakan tugas?
5. Hal apa saja yang menyebabkan pemerintahan desa sehingga terjadinya ketergantungan?

Kesalahan dalam efeksi

1. Apakah pemerintahan desa pernah melakukan ketidak nyamanan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat?
2. Bagaimana tindakan pemerintahan desa jika terjadi ketidak nyamanan dalam lingkungan masyarakat?
3. Apa permasalahan utama yang terjadi jika adanya ketidak nyamanan dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan desa?
4. Apakah ada perilaku pemerintahan desa yang tidak sesuai sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dengan pemerintahan desa?

Apakah ketidak nyamanan dalam melaksanakan tugas dapat berpengaruh dalam pemerintahan desa?

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambar2.1 Kantor Desa Fadoro Fulolo



Sumber: Dokumentasi Penelitian (2023)

Kantor Pemerintah Desa Fadoro Fulolo beralamat di jalan gowe zalawa Kecamatan lotu Kabupaten Nias Utara. Pemerintah Desa Fadoro Fulolo pada Tahun 2019 s.d 2025 di pimpin Oleh Kepala Desa an. Itolo Harefa,S.E. Dalam melaksanakan aktifitasnya, Pemerintah Desa Fadoro Fulolo telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program-program Pemerintahan Desa dan fungsi (tupoksi) Pemerintahan Desa Fadoro Fulolo

2.1.2 Sejarah Pemerintah Desa

Nama Nama Kepala Desa

Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Fadoro Fulolo

No	Nama	Keterangan
1	Ama Welu Harefa	Defenitif
2	Ama Daliami Harefa	Defenitif
3	Ama Jari Harefa	Defenitif
4	Ama Sania Harefa	Pj. Kades.
5	Ama Loren Harefa	Defenitif
6	Itolo Harefa, S E	Pj. Kades.

1. Keadaan Sosial Desa

Penduduk Desa Fadoro Fulolo pada dasarnya adalah penduduk asli dari pemekaran Desa Lotyang berasal dari Penduduk setempat dan sebagian pendatang dari beberapa wilayah di Kepulauan Nias, serta didominasi marga Harefa . Adat istiadat serta budaya yang dimiliki adalah merupakan adat dan budaya asli Nias dengan kearifan lokal serta tradisi lisan yang hampir sama diseluruh Kepulauan Nias Utara dan lebih khusus di Kabupaten Nias sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sebelum terbentuknya Desa Fadoro Fulolo dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Fadoro Fulolo mempunyai jumlah penduduk 685 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 323 Jiwa, perempuan 362 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 145, yang terdiri dalam 3 (tiga) dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Penduduk :

- Dusun I : 256
- Dusun II : 360
- Dusun III: 69

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Tamat SD/ Belum Sekolah	245	12,51 %
2	Tamat SD/Sederajat	74	9,38 %
3	Tamat SMP/Sederajat	62	3,89%
4	Tamat SMA/Sederajat	121	7,95
5	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	48	4,36

2. Keadaan Ekonomi Desa

a. Potensi Unggulan Desa

1. Pertanian

Kegiatan ekonomi Desa Fadoro Fulolo selama ini masih didominasi sector pertanian. Komoditi utama sektor pertanian adalah Karet dan Padi. Di samping tanaman karet dan padi, petani juga menanam tanaman lain seperti ubi jalar dan ubi kayu

2. Pertenakan

Sektor perternakan yang ada dan berkembang di desa Fadoro Fulolo antara lain babi, ayam dan lain lain.

3. Perdagangan

Sektor perdagangan dalam perkembangannya mengalami peningkatan. Keadaan ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha di bidang perdagangan. Kegiatan perdagangan yang dijalankan masyarakat desa Fadoro Fulolo antara lain perdagangan produksi hasil pertanian, kebutuhan pokok rumah tangga dan lain-lain.

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan perekonomian di Desa Fadoro Fulolo mengalami kemeresotan. Pertumbuhan perekonomian dapat dilihat di sector pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengolah hasil pertanian serta masyarakat hanya focus pada bidang pertanian yaitu karet dan padi, sehingga dapat dikategorikan bahwa pertumbuhan ekonomi di desa Fadoro Fulolo tidak dapat menetap/musiman karena dipengaruhi keadaan cuaca.

2. Keadaan Kesehatan Masyarakat

Secara umum Desa Fadoro Fulolo termasuk desa yang aman dari wabah penyakit berbahaya. Data menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi penyebaran wabah penyakit menular dan berbahaya. Penyakit yang sering di keluhkan adalah masalah gangguan kesehatan musiman dan bersifat sementara seperti batuk,flu,sakit kepala dan demam. Untuk angka kematian bayi dan ibu relative kecil, dikarenakan kader posyandu, bidan dan tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan /pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

Di desa Fadoro Fulolo,terdapat beberapa sarana kesehatan antara lain :

a. pos pelayanan Terpadu(posyandu)

No	Posyandu	Lokasi	Jumlah Unit
1	Posyandu	Dusun II	1

Posyandu tersebut aktif menjalankan kegiatan rutin setiap bulan seperti imunasi,pemberian vitamin dan penimbangan berkala bagi balita serta pemeriksaan bagi ibu hamil.

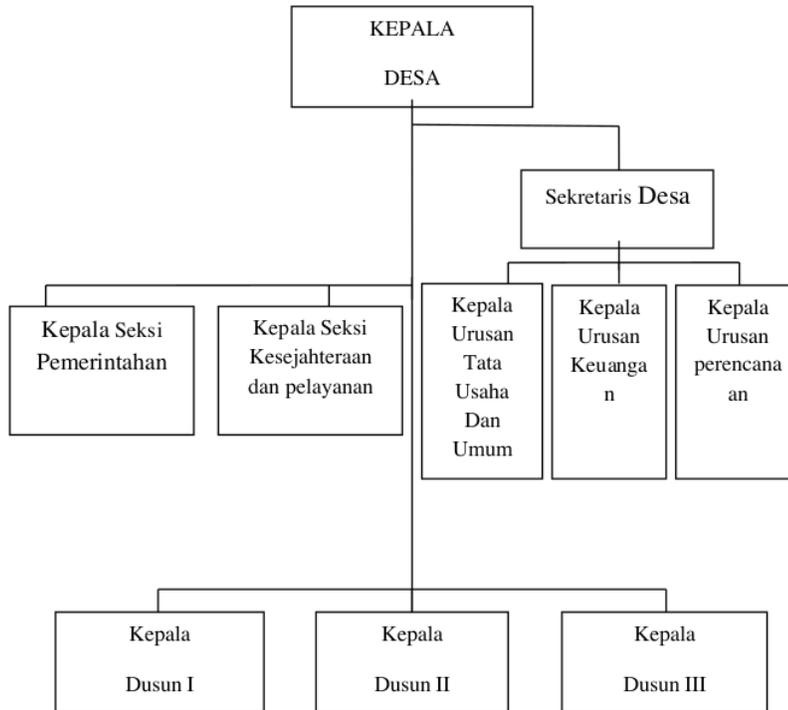
4.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi atau pembagian susunan pembagian tugas dan peranan masing-masing jabatan sesuai dengan fungsi dan pekerjaannya pada

Jumlah Aparatur Desa Fadoro Fulolo Sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari :

Kepala Desa	Itolo Harefa, S E
Sekretaris Desa	Sayafao Harefa
Kepala Seksi Pemerintahan	Otomosi Harefa
Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan	Hatini Harefa
Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	Aliusman Harefa
Kepala Urusan Keuangan	Agustinus Harefa
Kepala Urusan Perencanaan	Mawarieli Harefa
Kepala Dusun I	Efilman Harefa
Kepala Dusun II	Yaredi Harefa
Kepala Dusun III	Reniaro Harefa

Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi



Gambar 2.2

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Fadoro Fololo
Kabupaten Nias Utra



Sumber: (Olahan Penulis, 2023)

4.1.2 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

- 11 1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Pelaksanaan pembangunan
 3. Pembinaan kemasyarakatan
 4. Pemberdayaan masyarakat
 5. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

A. Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa
3. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan APBDES
6. Membina Kehidupan Masyarakat Desa
7. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa
8. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
9. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
10. Memanfaatkan teknologi tepat guna
11. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
12. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

13. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

A. Tugas Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

B. Fungsi Sekretaris Desa

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi;
2. Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan.

2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kasi Pemerintahan

A. Tugas Kepala kasi Pemerintahan

Kepala kasi Pemerintahan bertugas sebagai membantu KepalaDesa sebagai pelaksana tugas operasional.

B. Fungsi Kepala kasi Pemerintahan

1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
2. Penyusunan rancangan regulasi desa

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa
4. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa
5. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa
6. Penataan dan pengelolaan wilayah
7. Pendataan dan pengelolaan profil Desa
8. Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa
9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat
10. Pelayanan kepada masyarakat
11. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya
12. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya
13. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa

2.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan

A. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

B. Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan, Adat & Budaya

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
2. Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa
3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Desa

4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna
5. Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya
6. Pelayanan kepada masyarakat
7. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

2.3.5 Tugas Pokok Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

A. Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

B. Fungsi Kepala Urusan TU dan Umum

Kepala Urusan TU dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti :

1. Administrasi surat menyurat
2. Arsip
3. Ekspedisi
4. Penataan administrasi perangkat desa
5. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor
6. Penyiapan rapat
7. Pengadministrasian aset
8. Inventarisasi
9. Perjalanan dinas
10. Pelayanan umum

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa

2.3.6 Tugas Pokok Urusan Keuangan

A. Tugas Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

B. Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :

1. Pengurusan administrasi keuangan
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
3. Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa

2.3.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan dan Perencanaan

A. Tugas Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

B. Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti :

1. Menyusun rencana APBDesa
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program
4. Penyusunan laporan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa

2.3.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

A. Tugas Kepala Dusun

Kadus berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

B. Fungsi Kepala Dusun

1. Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya
2. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya
3. Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
4. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
5. Pelayanan kepada masyarakat
6. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang permasalahan yang menjadi masalah pada Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara. Dimana penelitian ini kemudian penulis uraikan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti pada lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai 10 informan dimana 4 diantaranya adalah informan kunci pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan selama 10 hari berturut-turut dimana peneliti

mewawancarai para informan yang dinilai bertanggung jawab atas pelaksanaan “Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengatasi Konflik Budaya Di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara”. Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal (Senin, 21 Agustus 2023 – Jum’at, 1 September 2023), yang penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu Desa Fadoro Kec. Lotu Kab. Nias Utara. Adapun hasil penelitian yang peneliti dapatkan, dapat diuraikan sebagai berikut:

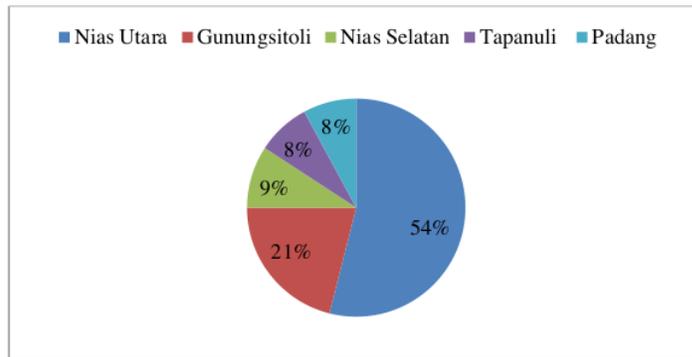
4.2.1 Peran Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik budaya di Desa Fadoro Kec. Lotu Kab. Nias Utara

Konflik terjadi dapat diakibatkan dari adanya gesekan atau perbedaan pendapat antar individu yang memicu pertengkaran atau pertikaian. Konflik yang terus terjadi atau berkelanjutan akan mengakibatkan dampak ataupun pengaruh buruk bagi sebuah organisasi ataupun individu yang mengalami konflik. Maka dari itu dibutuhkan campur tangan pihak ke-tiga yang diharapkan dapat menengahi konflik atau permasalahan yang terjadi sehingga menemukan titik terang. Menurut Wibowo (2019:220) menjelaskan bahwa sejatinya konflik adalah proses atau hasil interaksi dimana pihak pertama merasa bahwa kepentingannya ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lainnya.

Konflik yang terjadi antar masyarakat terkadang melibatkan konflik yang melibatkan budaya. Dimana hal ini disebabkan dari sebuah latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Budaya dalam hal ini diartikan sebagai kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan diturunkan secara turun-temurun dan menjadi sebuah identitas bagi sebuah keluarga, ataupun kelompok masyarakat. Konflik yang terjadi dari beberapa faktor yang disebabkan oleh internal dan eksternal dalam kelompok masyarakat terutama sebuah desa seharusnya tidak dibiarkan belarut-larut dan menjadi permasalahan yang bekepanjangan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah peran dari pemerintah desa dalam menjadi pihak ketiga yang dapat mengatasi maupun menangani hal tersebut, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 26 tentang desa bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Konflik antar masyarakat tidak begitu mendapat perhatian jika hanya terjadi dalam sekali. Namun apabila konflik terjadi tidak hanya sekali akan berdampak pada citra buruk pemerintahan desa yang dianggap tidak mampu mengatasi konflik yang terjadi pada lingkungannya. Pada hakekatnya pemerintah dibutuhkan untuk dapat menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala persinggungan internal dari masyarakat. Konflik budaya diakibatkan oleh beberapa elemen dari dalam masyarakat itu sendiri. Adanya faktor pemicu konflik serta perkelahian dalam masyarakat yang diakibatkan dari adanya perbedaan latar belakang budaya yang ada pada masyarakat Desa Fadoro Fulolo. Sebagaimana hal ini didukung dari adanya data presentasi latar belakang budaya masyarakat desa berikut ini:

Gambar 4.1 Presentase latar belakang budaya masyarakat Desa Fadoro Fulolo



Sumber: Kantor Desa Fadoro Fulolo, hasil penelitian (2023)

Pada presentase diatas terdapat beberapa latar belakang asal tempat tinggal dari masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang asal dari masyarakat tersebut dapat menimbulkan perbedaan kebiasaan atau pola pikir dan prinsip dari masyarakat itu sendiri atau disebut dengan perbedaan budaya. Nias Utara, Nias Selatan dan Gunungsitoli merupakan satu kepulauan yakni kepulauan Nias. Namun, dibelakang itu terdapat beberapa perbedaan dari budaya yang dianut atau dipercayai dan kebiasaan dari masing-masing Kabupaten dan Kota tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten dari Kepulauan Nias yang dimana budaya nyamemiliki budaya sangat oriental namun memiliki sedikit perubahan diakibatkan dari Kabupaten

Nias Selatan merupakan daerah wisata dari wisatawan asing maupun lokal. Kota Gunungsitoli memiliki budaya tidak begitu kental, hal ini diakibatkan dari Kota Gunungsitoli sendiri merupakan Ibu Kota dari Kepulauan Nias, sedangkan Nias Utara merupakan salah satu Kabupaten yang terletak dibagian utara Kepulauan Nias yang memiliki budaya yang sangat oriental dan masih terjaga. Perbedaan selanjutnya lebih terlihat dari adanya beberapa masyarakat yang berasal dari luar daerah kepulauan Nias.

Perbedaan yang terjadi terkadang mengakibatkan konflik budaya yang dimana terjadinya persaingan sumber daya (pemakaian infrastruktur publik), Komunikasi yang tidak efektif sehingga mengakibatkan terjadinya diskriminasi minoritas. Hal ini peneliti lihat diakibatkan dari kurangnya kesadaran dan pendidikan ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran tentang keberagaman budaya dapat menjadi faktor pendorong konflik budaya. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dapat memperbesar kesenjangan dan memicu konflik di desa. Terjadinya konflik yang sebelumnya peneliti duga diakibatkan dari keterbatasan sumber daya pemerintahan desa menghadapi konflik budaya. Berdasarkan hal tersebut peneliti kemudian ingin mengetahui peran dari pemerintah dalam mengatasi konflik budaya pada Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara.

Seperti apa yang telah dipaparkan pada BAB II tentang tugas dan fungsi Pemerintah Desa, tentunya segala program menjaga ketertibandan keamanan dalam masyarakat disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Menurut Pj. Kepala Desa Fadoro Fulolo, salah satu tugas pemerintah daerah ialah menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan pola tindakan yang dilakukan lebih dalam dijelaskan bahwa kantor kecamatan yang dipimpinnya itu lebih bersifat konsep dan preventif selanjutnya dalam penerapan di lapangan terkait bila peristiwa perkelahian berlangsung makaitu merupakan tugas dari kepolisian. Dari hasil wawancara dengan Pj. Kepala Desa Fadoro Fuloloinforman Itolo Harefa, SE, yang menyatakan bahwa

“Kita melakukan pendekatan sosialisasi aturan seperti aturan tentang terorisme, agama dan aturan mengenai ketertiban dan

keamanan”. Tidak hanya itu kami juga bertindak memfasilitasi hubungan antar lembaga terkhusus untuk pencapaian ketahanan internal dalam masyarakat, penegak kewaspadaan nasional, penegakan hak asasi manusia (HAM) serta upaya ketahanan sosial ekonomi.”

Berdasarkan informasi wawancara diatas dapat disimpulkan berdasarkan wawancara bahwa Pemerintah Desa Fadoro Fulolo lebih mengutamakan pola penyampaian konsep masyarakat damai kepada berbagai elemen serta bersifat investigatif terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Selain itu, program juga dikhususkan pada beberapa wilayah yang memang dekat dengan siklus perkelahian antar masyarakat. Lebih lanjut hasil wawancara dengan Pj. Kepala Desa Fadoro Fulolo informan Itolo Harefa, SE yang berkaitan dengan perannya dalam menyelesaikan konflik adalah sebagai berikut:

“Kita sudah beberapa kali mengadakan perdamaian dengan mempertemukan para pemuda yang terlibat perkelahian, tidak hanya itu kami juga bekerja sama dengan aparat kepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat dalam menerapkan program pemerintah desa melalui program pemberdayaan masyarakat Desa Fadoro Fulolo”

Gambar 4.2 Bentuk kerjasama Pemerintah Desa dengan TNI dan POLRI



Sumber: hasil penelitian (2023)

1 Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Desa Fadoro Fulolo beserta pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan para kelompok yang terlibat konflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanyasebatas perdamaian saja, karena belum ada hasil yang maksimal, dimana diharapkan mampu meredam munculnya kembali konflik. Terbukti setelah beberapa kali diadakan perdamaian, konflik yang tidak kembali terjadi.

Seperti penuturan dari salah satu informan yakni Masyarakat Desa Fadoro Fuloloyakni informan Tika Ainun Sari Jambak, bahwasannya:

“Pemerintah memang sudah melakukan perdamaian, dan pemerintah benar- benar mengusut tuntas apa sebenarnya permasalahan yang mendasar. Melakukan mempertemukan, bukan hanya sebatas formalitas, toh buktinya konflik tidak kembali terjadi”.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu informan Sekretaris Desa yakni Sayafao Harefa, menurut keterangannya:

“Kinerja pemerintah belum sepenuhnya sempurna, masamelakukan perdamaian akan tetapi pelaku utama yang berkonflik tidak dihadirkan, bagaimana ceritanya mau berdamai. Masa yang mau didamaikan itu orang-orang yang tidak berkonflik, kananeh”

1 Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah cukup maksimal dalam menyelesaikan Konflik tersebut, terbukti bahwa kurangnya terjadinya konflik budaya lagi masyarakat. Lebaranya persoalan konflik dengan kemampuan pemerintah yang terbatas untuk menyelesaikanya apalagi dengan metode yang kurang tepat sering bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan konflik. Berdasarkan pernyataan tersebut harus dibangun bagaimana cara penyelesaian konflik yang muncul dari *bottom-up* yang secara damai dan melibatkan semua pihak.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa konflik budaya pada Desa Fadoro Fulolo dilatar belakang oleh latar belakang asal dan budaya masyarakat yang berbeda-beda, yang dimana latar belakang berbeda tersebut menjadi api pemicu gesekan yang terjadi pada masyarakat. Konflik budaya yang ada pada Desa Fadoro Fulolo terjadi juga diantara masyarakat atau pemuda yang ada pada Desa Fadoro Fulolo,

Pemerintah Desa telah melakukan tugasnya untuk melakukan upaya perdamaian dengan berbagai cara untuk mendamaikan pihak yang berseteru, selain itu Pemerintah Desa Desa Fadoro Fulolo juga berkerjasama untuk menjalankan peran mencapai tujuan Desa Fadoro Fulolo yang aman nyaman bagi masyarakatnya dengan pihak yang berwajib yakni dari Kepolisian dan Tentara Negara Indonesia. Hal tersebut juga selaras dengan peran yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan mappedeceng pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh. Asdarfian (2022), dimana dalam mengatasi konflik antar kelompok yang terjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menjalin kerjasama dengan pihak yang berwajib atau berwenang. Untuk uraian lebih lanjutnya kan peneliti uraikan sebagai berikut ini:

4.2.1.1 Kesalahan komunikasi

Kesalahan komunikasi sering menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik budaya pada sebuah kelompok masyarakat juga dapat dialihkan menjadi sebuah langkah dari peran dalam mengatasi konflik yang terjadi. Sebagaimana menurut Fitriana (2019:192) salah satu indikator dari konflik adalah kesalahan komunikasi dimana kesalahan komunikasi tersebut terjadi dari apabila seseorang atau lebih menerima informasi yang berbeda atau tidak sama dengan sumber informasi sehingga terjadi perbedaan mendasar dalam mempersepsikan isi dari persepsi tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh. Asdarfian (2022) pada penelitian Peran Pemerintahan Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Kelompok di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, menyebutkan bahwa salah satu peran yang dilakukan oleh pemerintah Daerah adalah dengan kesalahan komunikasi menjadi salah satu faktor terjadinya konflik antar kelompok, namun faktor tersebut dapat diatasi pemerintah dengan pemerintah berperan dalam memberikan komunikasi yang efektif dan tidak menyebabkan kesalahpahaman penafsiran. Sehingga kesalahan komunikasi yang dapat menjadi faktor terjadinya konflik juga dapat menjadi bagian dari peran Pemerintah Desa dalam mengatasi terjadinya konflik. Berdasarkan hal tersebut peneliti kemudian melakukan wawancara kepada Yernawati Zega sebagai masyarakat desa untuk

mengetahui apakah terdapat kesalahan komunikasi yang menjadi unsur dari konflik pada Desa Fadoro Fulolo, dimana informan mengatakan bahwa:

“iya, kurangnya komunikasi yang efektif, kadang menjadi penghalang dalam memahami dan memecahkan masalah yang terjadi. Sehingga kadang komunikasi yang tidak efektif ini memperburuk konflik yang terjadi, seperti kejadian yang terjadi pada Bulan Agustus yakni dalam menyambut hari Kemerdekaan dimana pemerintah desa memberikan informasi bahwa agar lebih menjaga ketertiban dan keamanan, dan menaikkan bendera merah putih pada halaman masing-masing masyarakat. Namun, informasi tertulis yang diberikan dalam bahasa Indonesia tersebut banyak disalah pahami karena kurangnya pemahaman masyarakat akan bahasa Indonesia yang betul menganggap bahwa hari kemerdekaan tidak seperti biasanya yang disambut dengan berbagai lomba dan kegiatan dalam masyarakat melainkan masyarakat dituntut untuk tenang dan kondusif, kesalahanan komunikasi tersebut mengakibatkan konflik”

Berdasarkan informasi wawancara diatas dapat disimpulkan berdasarkan wawancara bahwa ketidak efektifan dalam komunikasi ini disebabkan dari adanya perbedaan bahasa yang cara komunikasi dari masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Masih adanya beberapa masyarakat Desa Fadoro Fulolo yang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia yang fasih dan benar menyebabkan terjadinya kesalah pahaman dalam penafsiran informasi yang diberikan sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Sedangkan berdasarkan hasil observasi peneliti melihat dimana masyarakat pada Desa Fadoro Fulolo memiliki beberapa masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai daerah yang dimana ini akibat dari adanya pemekaran daerah yang menyebabkan terjadinya migrasi masyarakat karena faktor pekerjaan, dan lain sebagainya. Tingkat perbedaan latar belakang asal masyarakat dapat menjadi perbedaan latar bulakang budaya yang terjadi, dimana hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1.

Permasalahan lain terjadi pada Desa Fadoro Fulolo dimana terjadinya permasalahan yang disebabkan oleh terpecahnya adat yang ada pada Desa Fadoro Fulolo. Hal ini lebih jelasnya diungkapkan oleh informan Itolo Harefa, SE sebagai Pj. Kepala Desa Fadoro Fulolo yang mengatakan bahwa faktor yang paling besar adalah terjadinya perpecahan adat pada Desa Fadoro Fulolo, hal ini bermula dari adanya kelompok adat Desa Fadoro Fulolo yang sudah dikukuhkan dan diakui oleh pemerintah berdiri sejak tahun 2014 dengan ketua kelompok adat yakni Syafardin Harefa. Di lain sisi terdapat pula kelompok adat baru yang berdiri pada bulan November pada tahun 2021 dan bernama kelompok adat Sepakat dengan ketua kelompok adat yakni Wirawan Telaumbanua. Lebih jelasnya hal ini diungkapkan bahwa kelompok adat Desa Fadoro Fulolo oleh ketua kelompok mengajukan mediasi melalui pemerintahan Desa Fadoro Fulolo untuk mencari jalan tengah dan solusi, dimana dari kelompok adat Desa Fadoro Fulolo yang telah berdiri sejak awal merasa bahwa kelompok adat Desa Fadoro Fulolo telah berdiri dari tahun 2014 proses pembentukannya telah melalui musyawarah dan mufakat serta dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Fadoro Fulolo itu sendiri. Sehingga kelompok adat Desa Fadoro Fulolo yang berdiri terlebih dahulu mengatakan bahwa dengan berdirinya kelompok adat Sepakat tersebut akan menimbulkan perpecahan karena pembentukan dirasa tidak didasari oleh musyawarah masyarakat desa. Sedangkan menurut ketua kelompok adat Sepakat mengatakan bahwa pembentukan kelompok adat baru tersebut dilakukan mengingat masyarakat Desa Fadoro Fulolo semakin bertambah. Dalam hal ini informan Itolo Harefa, SE sebagai Pj. Kepala Desa Fadoro Fulolo mengatakan bahwa permasalahan tersebut telah dibantu oleh pemerintahan Desa Fadoro Fulolo dengan melakukan mediasi pada tanggal 18 Agustus 2023 meskipun berakhir ricuh. Hal ini disebabkan dari banyaknya kesalahpahaman yang telah terjadi sejak lama dan dibiarkan tanpa dicari jalan solusi. Namun, Pj. Kepala Desa Fadoro Fulolo dalam hal ini mengatakan bahwa karena ini merupakan permasalahan adat akan dilanjutkan atau menyerahkan hal ini kepada penghulu adat untuk diselesaikan secara adat.

Hasil yang peneliti dapatkan bahwa adanya ketidak efektifan dalam komunikasi yang dapat menyebabkan kesalahan komunikasi menyebabkan peneliti ingin

mengetahui apa tindakan atau peran yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik yang terjadi tersebut. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Itolo Harefa, SE sebagai Pj. Kepala Desa Fadoro Fulolo, mengatakan bahwa:

“kita sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini mengatasinya dengan mengadakan pertemuan yang diadakan secara informal untuk memberikan informasi maupun musyawarah yang dimana pertemuan tersebut juga akan dihadiri dari berbagai kepala lingkungan atau dusun sebagai pihak yang membantu masyarakat dusunnya dalam memahami informasi yang diberikan, selain itu dalam pemberian informasi secara tertulis Pemerintah Desa membuat surat pemberitahuan yang memuat informasi dalam dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Daerah Nias”

Gambar 4.3 Musyawarah yang diadakan Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik



Sumber : hasil penelitian (2023)

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan berdasarkan wawancara bahwa dengan adanya kerja sama Pemerintah Desa dan Kepala Dusun dalam hal ini mencegah adanya kesalahan komunikasi dan dengan memberikan informasi tertulis dengan menggunakan dua bahasa menjadi salah satu langkah Pemerinah Desa mengatasi juga mengatasi adanya kesalahan komunikasi yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa selain pemberian informasi tertulis yang mengandung dua bahasa yang dapat mempermudah pertukaran informasi antar masyarakat, penyebar informasi yang ditugaskan juga merupakan petugas atau pegawai Pemerintahan Desa yang memang mampu menguasai dan dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga informasi yang diberikan dapat tersampaikan sebagai mana mestinya. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa salah satu peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Fadoro Fulolo adalah dengan mengatasi konflik budaya yang terjadi dari adanya faktor kesalahan komunikasi dari kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan bahasa Indonesia yang benar dengan memberikan informasi dengan menggunakan dua bahasa.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Fadoro Fulolo dalam hal ini salah satu peran yang dilakukan dan menjadi strategi yang digunakan dalam mengatasi konflik budaya dalam masyarakat merupakan dengan mengatasi adanya kesalahan komunikasi yang terjadi antar masyarakat Desa, hal ini dilakukan dengan selalu mengadakan pertemuan atau musyawarah yang bersifat formal yang pada pertemuan ini mempermudah masyarakat dalam bertukar informasi dengan mudah dengan diakomodasi oleh Kepala Dusun masing-masing, dan juga dengan memberikan atau melakukan pertukaran informasi dengan menggunakan dua bahasa yang dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat desa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Daerah Nias, sehingga informasi dan komunikasi yang terjalin dapat menjadi efektif. Hal yang sama terjadi pada konflik yang terjadi **Antara Kelurahan Kambiolangi Dengan Kelurahan Salubarani Di Perbatasan Kabupaten Enrekang– Kabupaten Tana Toraja**, pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Hafifa (2018) dimana salah satu peran pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan seluruh aparat desa.

4.2.1.2 Perbedaan tujuan

Harapan dan tujuan dari masing-masing individu berbeda-beda. Hal ini disebabkan dari adanya persepsi dan pola pikir yang berbeda-beda dari masing-masing. Terutama sudah dilatar belakangi oleh budaya yang berbeda-beda

tentunya membuat angka perbedaan tujuan dan harapan menjadi lebih besar. Perbedaan tujuan dapat melatar belakangi adanya konflik antar individu maupun masyarakat. Hal ini juga disebutkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul hafifa (2018) dalam penelitiannya yang berjudul **Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antara Kelurahan Kambiolangi Dengan Kelurahan Salubarani Di Perbatasan Kabupaten Enrekang– Kabupaten Tana Toraja**, yang dimana pada penelitiannya mengatakan bahwa perbedaan tujuan dari masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik. Sebagaimana menurut Fitriana (2019:192) salah satu indikator dari konflik adalah perbedaan tujuan dimana perbedaan tujuan dalam hal ini apabila seseorang atau lebih memiliki ketidaksamaan dalam memandang tujuan-tujuan yang hendak dicapai sehingga terjadi pertentangan dalam menyikapi tujuan-tujuan tersebut.

Perbedaan pendapat akan tujuan dari penyebab terjadinya konflik yang terjadi pada Desa Fadoro Fulolo dimana adanya perbedaan antar masyarakat yang menganggap bahwa tujuan pembangunan desa. Pembangunan desa berperan sangat penting dalam perubahan, perkembangan dan kemajuan sebuah daerah hal ini disebutkan didalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayler Beniah Ndaraha (2018). Harapan dari sebagian masyarakat berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu informan Denorius Harefa dimana menganggap bahwa semestinya lebih mengutamakan kepada arah kesehatan masyarakat desa. Pembangunan desa kearah kesehatan masyarakat yang diharapkan adalah adanya pembangunan fasilitas kesehatan atau puskesmas yang memadai dimana berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa keadaan puskesmas yang ada kurang memadai dari segi sarana dan prasarana yang ada, selain itu masyarakat mengharapkan adanya peran pemerintah dalam menangani balita-balita yang kekurangan gizi, serta pembangunan jamban sehat yang salah satu program dari pemerintah sampai saat ini belum dilakukan.

Namun terdapatnya beberapa masyarakat desa yang mengharpakan tujuan dari pembangunan desa yang terjadi lebih dominan mengarah kepada pembangunan infrastruktur desa hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu masyarakat desa yakni informanAgustinus Harefa. Pembangunan kearah

infrastruktur desa diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan dalam pembangunan perekonomian desa. Perbedaan tujuan yang terjadi tersebut menyebabkan konflik antar masyarakat yang mempunyai tujuan yang berbeda akan pembangunan desa yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut peneliti kemudian melakukan wawancara kepada informan Itolo Harefa, SE sebagai Pj. Kepala Desa Fadoro Fulolo, dimana informan mengatakan bahwa:

“perbedaan pendapat akan tujuan dari pembangunan desa dari masyarakat desa merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, konflik yang terjadi akibat perbedaan tersebut memang terkadang terjadi. Seperti kejadian pada tahun 2021, Pemerintahan desa mengusulkan untuk membangun sebuah puskesmas di desa tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam segi kesehatan. Akan tetapi, banyak masyarakat yang tidak bisa menghibahkan tanahnya sebagai tempat pembangunan puskesmas tersebut. Sehingga usulan dari Pemerintahan Desa sampai saat ini masih belum tercapai. Kami sebagai pemerintah desa dalam hal ini menangani hal tersebut dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan urgensi pembangunan desa yang dilakukan, baik pembangunan desa kearah kesehatan masyarakat atau pembangunan desa kearah infrastruktur desa. Pemerintah desa dalam hal ini akan bersifat transparan dan informatif serta bersikap adil akan pembangunan desa yang dilakukan namun tetap mengedepankan pembangunan yang urgent untuk dilakukan”

Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan berdasarkan wawancara bahwa konflik yang terjadi dari adanya perbedaan tujuan masyarakat masih bisa diatasi dengan peran dari pemerintah desa yang dimana berdasarkan hasil observasi peneliti pemerintah desa berperan adil dalam menampung seluruh aspirasi dan harapan dari masyarakat yang tentunya memiliki harapan terbaik untuk tujuan dari pembangunan desa itu sendiri. Maka dapat disimpulkan berdasarkan wawancara dan observasi adalah Pemerintahan desa Fadoro Fulolo mengatasi adanya konflik budaya untuk menghindari terjadinya perbedaan tujuan

terhadap masyarakat dengan melakukan menerima dan menampung seluruh aspirasi yang di berikan masyarakat desa.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Fadoro Fulolosesuai dengan mekanisme dalam mengatasi konflik budaya dari adanya perbedaan tujuan masyarakat akan pembangunan desa yakni:

1. Masyarakat yang menganggap tujuan pembangunan desa lebih kepada arah pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana desa, hal ini karena sebagian masyarakat menganggap bahwa pembangunan desa ini akan lebih dapat mamajukan perekonomian masyarakat desa, dimana akan terbukanya wisata desa yang akan memajukan ekonomi masyarakat.
2. Masyarakat yang lebih menganggap tujuan pembangunan desa kearah fasilitasi kesehatan atau penanganan gizi anak. Sebagaimana hasil observasi peneliti yang melihat bahwa hal ini diakibatkan dari masyarakat menganggap bahwa fasilitas kesehatan seharusnya diutamakan dimana pada Desa Fadoro Fulolo terdapat anak yang kekurangan gizi dan juga akses puskesmas yang memadai.

Permasalahan lain terjadi pada DesaFadoro Fulolo dimana terjadinya permasalahan yang disebabkan oleh terpecahnya adat yang ada pada Desa Fadoro Fulolo. Hal ini yang melibatkan kelompok adat Desa Fadoro Fulolo yang sudah dikukuhkan dan diakui oleh pemerintah berdiri sejak tahun 2014 dengan ketua kelompok adat yakni Syafardin Harefa. Dilain sisi terdapat pula kelompok adat baru yang berdiri pada bulan November pada tahun 2021dan bernama kelompok adat Sepakat dengan ketua kelompok adat yakni Wirawan Telaumbanua. Dimana didalam hal ini terdapat pula perbedaan tujuan yang dimiliki oleh kedua kelompok adat tersebut. Dimana kelompok adat Desa Fadoro Fulolo yang beridri terlebih dahulu memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan sedangkan kelompok adat sepakat bertujuan untuk mengatasi semakin banyaknya masyarakat Desa Fadoro Fulolo yang sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan adat masyarakat Desa Fadoro Fulolo .

Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan tujuan menjadi salah satu hal yang dapat memicu terjadinya konflik budaya pada masyarakat. Berdasarkan hasil obervasi peneliti melihat bahwa konflik perbedaan tujuan menjadi salah satu peyumbang terjadinya konflik budaya yang paling besar pada Desa Fadoro Fulolo. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh. Asdarfian (2022) dimana salah satu cara mengatasi konflik yang terjadi antar kelompok di Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah desa Fadoro Fulolo dimana pemerintah desa berperan adil dalam menampung seluruh aspirasi dan harapan dari masayraakat yang tentunya memiliki harapan terbaik untuk tujuan dari pembangunan desa itu sendiri.

4.2.1.3Perbedaan penilaian atau persepsi

Setiap individu memiliki taraf penilaian dan persepsi yang berbeda-beda akan sebuah hal. Hal ini dikarenakan setiap manusia pola pikir yang berbeda-beda pula. Perbedaan sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik antar individu maupun kelompok masyarakat. Sebagaimana perbedaan penilaian dan persepsi menjadi salah satu indikator dari konflik menurut Fitriana (2019:192) dimana perbedaan penilaian dan prisnip Perbedaan dalam penilaian antara anggota dalam suatu organisasi, seringkali disertai oleh perbedaan-perbedaan dalam sikap, ketidaksesuaian nilai, persepsi, yang juga dapat menimbulkan konflik.

Perbedaan tentang penilaian dan persepsi menyangkut tentang perbedaan kepentingan didalam masyarakat. Perbedaan akan ketidaksepahaman akan prinsip dan persepsi akan kehidupun juga tak jarang menimbulkan gesekan konflik yang terjadi. Desa Fadoro Fulolo memiliki jumlah penduduk 685 jiwa, Selain itu berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa terdapat konflik yang didasari dari adanya perbedaan persepsi. Untuk melihat lebih lanjut konflik yang terjadi perbedaan penilaian dan persepsi yang ada pada Desa Fadoro Fulolo maka peneliti kemudian melakukan wawancara kepada informan Mawarieli Harefa sebagai Masyarakat Desa Fadoro Fulolo yang mengatakan bahwa:

“konflik pada perbedaan kepentingan atau persepsi memang terjadi pada Desa Fadoro Fulolo, hal ini terlihat dari terciptanya kelompok-kelompok didalam masyarakat desa. Hal ini tercipta dikarenakan adanya kelompok adat yang merasa telah berkuasa atau berdiri terlebih dahulu. Seperti pada adat yang ada pada masyarakat pendatang di desa tersebut, mereka juga memiliki adat dari desa mereka masing- masing. Yang dimana ketika mereka melakukan suatu acara di desa Fadoro Fulolo, maka sebagian dari mereka mengikuti adat dari desa mereka sendiri. Akan tetapi masyarakat yang ada di desa Fadoro Fulolo tidak menerima adat yang mereka ikuti dari desa mereka masing- masing. Contohnya adat yang ada di desa tersebut yaitu memberikan yang namanya penghargaan (sumange), akan tetapi ada sebagian masyarakat pendatang tidak mengerti akan adat itu. Maka masyarakat setempat merasa tidak di hargai dengan adanya adat di Desa Fadoro Fulolo, sehingga menimbulkan suatu konflik antara masyarakat”

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan diatas dapat disimpulkan berdasarkan wawancara bahwa adanyapada Desa Fadoro Fulolo masyarakat desa cenderung menciptakan kelompok-kelompok didalam maysrakat. Dari yang peneliti lihat bahwa kelompok ini terdiri dari kelompok adat Desa Fadoro Fulolo yang telah berdiri terlebih dahulu yang berasal atau berpenduduk asli desa tersebut dan kelompok adat sepakat sebagai pendatang yang baru datang atau pindah ke desa tersebut. Perbedaan tingkatan sosial berdasarkan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat dalam berbudaya dikatakan masih menjadi penyebab konflik yang utama dalam perbedaan penilaian dan persepsi. Masih adanya penilaian masyarakat bahwa tokoh-tokoh yang terdapat masyarakat dapat memecahkan dan menjadi pengambil keputusan selain pemerintahan desa juga kerap kali menjadi persoalan, hal ini diakibatkan dari adanya perbedaan persepsi dari masyarakat lainnya yang menganggap bahwa setiap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan oleh pemerintahan desa secara resmi. Berdasarkan hal tersbeut

peneliti melakukan wawancara kepada informan Sayafao Harefa sebagai Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Sebagai pemerintahan desa dalam hal ini kami selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam hal ini pemerintah desa tidak melihat atau memandang dari sisi tingkat sosial pada masyarakat sehingga dipastikan tidak akan ada perbedaan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu setiap permasalahan yang terjadi dan dibawa secara jalur musyawarah masyarakat desa akan tetap ditangani oleh pemerintahan desa, dan permasalahan adat tidak akan disangkutpautkan dalam hal itu terkecuali jika terdapat hal yang menyangkut dengan adat pemerintah desa hanya dapat menjadi penengah atau memfasilitasi sebagai mediator”

Berdasarkan hasil obeservasi peneliti melihat bahwa tingkat toleransi masyarakat Desa Fadoro Fulolo Maka berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi di atas dapat di simpulkan bahwa perbedaan penilaian dan persepsi harus dapat diatasi oleh Pemerintahan Desa Fadoro Fulolo dengan mencari solusi agar tidak ada terjadinya konflik di antara masyarakat dengan bertindak sebagai fasilitator mediator dalam mengatasi konflik yang terjadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Fadoro Fulolo dalam mengatasi konflik budaya dari adanya perbedaan penilaian dan persepsi dimana pemerintah Desa Fadoro Fulolo menjamin bahwa masyarakat desa tidak perlu merasa khawatir akan perbedaan persepsi yang ada dimana pemerintah akan tetap menjaga agar keutuhan budaya maupun pemerintahan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa menyinggung pihak lainnya, dimana pemerintah desa akan menampung musyawarah yang diadakan oleh masyarakat apabila masyarakat membutuhkan pemerintah desa dalam mencari jalan solusi bagi konflik yang terjadi. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Ilma Wati.D (2020) dimana salah satu penyebab adanya konflik yang terjadi adalah adanya perbedaan persepsi antar mahasiswa selaras dengan cara manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Fadoro Fulolo.

4.2.1.4 Interpendensi Aktivitas kerja

Dalam aktifitas kegiatan masyarakat terdapat aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa. Misalnya adalah aktifitas gotong royong, dan adanya ronda (sistem keamanan lingkungan) yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dalam tujuan yang sama. Interdependensi aktifitas kerja menjadi salah satu indikator dari konflik menurut Fitriana (2019:192), dimana interpendensi aktifitas kerja apabila seseorang atau lebih saling tergantung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Konflik akan terjadi apabila seseorang dari mereka diberi tugas secara berlebihan dan apabila salah seorang atau lebih harus menunggu atau menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain.

Desa Fadoro Fulolo yang memiliki aktifitas kerjasama yang melibatkan kerjasama masyarakat dalam hal ini juga tak terlepas dari adanya konflik yang terjadi. Aktifitas kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Fadoro Fulolo adalah aktifitas gotong royong pembangunan rumah ibadah gereja, dan adanya aktifitas siskamling yang dilakukan setiap malam. Aktifitas yang dilakukan secara bersama-sama ini merupakan kesepakatan bersama masyarakat desa yang sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan tersebut. Dimana kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat bagi perkembangan dan perlindungan desa.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah seorang masyarakat desa yakni informan Werni Zalukhu mengatakan bahwa memang terdapat konflik yang terjadi akibat pekerjaan yang tidak dilakukan secara bersama-sama dan memiliki jadwal yang tidak merata dalam penetapan petugas siskamling. Permasalahan tersebut menjadi salah satu bentuk dari adanya interpendensi aktifitas kerja, dimana jadwal masyarakat yang bertugas sebagai siskamling adalah sekali sebulan, namun terdapat masyarakat yang mendapat jadwal tiga kali sebulan. Penyelenggaraan siskamling ini menggunakan anggaran dan masyarakat yang bertugas akan mendapat upah jasa. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada informan Aliusman Harefa sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik dari interpendensi kerja ini, dimana mengatakan bahwa:

“memang terdapat perbedaan dalam penetapan jadwal kerja bagi petugas siskamling. Namun, hal tersebut dipastikan bukan merupakan bentuk dari interpendensi kerja. Pembentukan petugas siskamling merupakan atas keinginan dan penawaran pribadi oleh masyarakat. Masyarakat yang menawarkan diri sebagai petugas siskamling sebagian besar mempunyai pekerjaan disiang harinya, kami dari Pemerintahan Desa memberikan jadwal ringan kepada masyarakat untuk memilih jadwalnya sendiri untuk mendukung ke efektifan dari program tersebut dan Pemerintah Desa memberikan jadwal yang kosong kepada petugas yang memang tidak memiliki pekerjaan tetap pada siang harinya, agar tidak terganggunya masyarakat dalam proses petugas siskamling. Akan tetapi banyak masyarakat yang bekerja pada siang hari, sehingga jadwal yang di berikan Pemerintahan Desa kepada masyarakat masih belum berjalan dengan efektif”

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan berdasarkan wawancara bahwa pemerintah desa dalam hal ini mendukung penuh program sistem keamanan lingkungan yang dilakukan guna menjaga lingkungan desa agar tetap aman dan nyaman. Sehingga dalam hal ini pemerintah desa melakukan peran dalam menagatasi konflik dari adanya interpendensi kerja yang terjadi dari program siskamling dengan membuka keluhan, serta peluang bagi masyarakat yang ingin menawarkan diri sebagai petugas dari siskamling itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa masyarakat Desa Fadoro Fulolo kurang berminat dengan tawaran yang diberikan oleh pemerintah desa dalam program siskamling, hal ini disebabkan karena pekerjaan ini terbilang cukup beresiko dan upah yang diberikan juga tidak sebanding dengan tawaran resiko pekerjaan menjaga keamanan lingkungan yang diberikan.

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi diatas masyarakat yang kurang minat dengan adanya program siskamling di karenakan pekerjaan yang beresiko akan tetapi Pemerintahan Desa sangat mendukung hal tersebut demi menjaga

lingkungan agar tetap nyaman. Maka dari itu Pemerintahan Desa mencari program lainnya agar lingkungan tetap terjaga dengan baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor interdependensi kerja dari adanya konflik budaya yang terjadi pada Desa Fadoro Fulolo, dimana hal ini timbul dari adanya upaya kegiatan dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban pada Desa Fadoro Fulolo dengan mengadakan kegiatan Siskamling, yang dimana kegiatan tersebut menimbulkan gesekan dari adanya interdependensi kerja yang juga menyinggung budaya masyarakat sehingga menyebabkan dan menciptakan terjadinya konflik budaya pada masyarakat Desa Fadoro Fulolo. Berdasarkan penelitian terdahul yang dilakukan oleh Suci Ramadhanti (2021) konflik yang terjadi pada Desa Kalampa seperti perkelahian/pertikaian, satu orang yang melakukannya maka semua orang akan kena, itulah yang membuat sebuah konflik menjadi besar, namun pemerintah desa dan pemuka agama yang dilakukan selaras dengan hal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Fadoro Fulolo dimana hal yang dilakukan adalah dengan melaksanakan program menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban pada Desa Fadoro Fulolo dengan mengadakan kegiatan Siskamling.

4.2.1.5 Kesalahan dalam efeksi

Perlakuan tidak mengenakan dapat disebut juga sebagai kesalahan dalam efeksi. Menurut Fitriana (2019:192) kesalahan dalam efeksi merupakan salah satu indikator dari konflik, dimana kesalahan dalam efeksi ini merupakan apabila seseorang memperlakukan rekannya menjadi tidak nyaman dalam beraktifitas atau bekerja, terutama dalam hal perasaan atau suasana hatinya. Perbuatan tidak menyenangkan ini biasanya terjadi didasari oleh beberapa faktor konflik kecil sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Ilma Wati.D (2020) pada penelitiannya yang berjudul Kesadaran Multikultural Terhadap Konflik Mahasiswa Melalui Pendekatan Etnopedagogi (Studi Kasus Terhadap Mahasiswaunismuh Makassar) mengatakan bahwa kesalahan dalam efeksi biasanya sebuah bentuk perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh

seseorang karena ingin memberitahu atau melampiaskan rasa ketidaknyamanan atau ketidakadilan yang dirasakannya dari sebuah konflik. Pada Desa Fadoro Fulolo adanya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam konteks konflik budaya. Diskriminasi berbasis budaya seperti perlakuan tidak adil, penindasan, atau pengekangan hak-hak kelompok minoritas bisa memperburuk konflik budaya dan menghambat pembangunan harmoni dalam keberagaman.

Berdasarkan hasil observasi peneliti hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pendidikan ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran tentang keberagaman budaya dapat menjadi faktor pendorong konflik budaya. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dapat memperbesar kesenjangan dan memicu konflik di desa. Untuk mengetahui lebih lanjut konflik yang terjadi dari adanya kesenjangan budaya tersebut peneliti melakukan wawancara kepada salah satu informan Tika Ainun Sari Jambak sebagai Masyarakat Desa Fadoro Fulolo yang mengatakan bahwa:

“memang pada desa ini terdiri banyak masyarakat yang memiliki latar belakang suku yang berbeda, namun hal tersebut menjadi pemicu konflik yang paling besar pada desa ini. Konflik yang biasanya ditimbulkan dari adanya perbedaan latar belakang budaya yaitu konflik kelompok adat yang terpecah yang menjadi sebuah konflik yang besar pada desa. Konflik ini timbul dikarenakan dari segi berpakaianya, banyak masyarakat yang terpengaruh dengan adanya zaman sekarang. Sehingga mereka tidak merasa malu dan bahkan mereka merasa percaya diri dengan yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak merasakan bahwa dengan mengikuti zaman itu, akan mengrugikan diri di tengah- tengah masyarakat banyak”

Berdasarkan informasi diatas dapatdisimpulkan berdasarkan wawancara bahwa konflik komunikasi yang terhambat karena adanya latar belakang budaya yang berbeda memang menjadi persoalan yang serius, sebagaimana perpecahan

kelompok adat yang menyebar dan menjadi persoalan dan konflik yang lebih besar sehingga menyebabkan adanya perbuatan yang tidak menyenangkan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu informan Hendri Tarigan dan Denorius Harefa sebagai Masyarakat Desa Fadoro Fulolo bahwa mereka mengatakan hal yang sama bahwa perbuatan tidak menyenangkan biasanya dipicu dari adanya kesalahan komunikasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbuatan yang tidak menyenangkan yang biasanya menjadi konflik pada Desa Fadoro Fulolo seperti, adu mulut atau perdebatan yang terjadi antar masyarakat, namun dari hasil observasi peneliti melihat bahwa pernah ada konflik yang sampai melibatkan fisik dan pihak kepolisian, kejadian ini terjadi pada bulan Agustus 2023 pada saat pemerintahan Desa Fadoro Fulolo melakukan mediasi kepada kedua kelompok adat yang ada pada Desa Fadoro Fulolo yang berakhir dengan ricuh dan situasi yang tidak terkendali sehingga melibatkan bantuan TNI dan POLRI dalam melakukan pengamanan. Hal ini membuktikan bahwa peran dari pemerintahan desa belum cukup menjaga keamanan dan kenyamanan dari masyarakat desa nya itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan Sayafao Harefa sebagai Sekretaris Desa untuk mengetahui apa saja peran dari pemerintah desa dalam mengatasi konflik yang terjadi dari adanya kesalahan efeksi, dimana informan mengatakan bahwa:

“desa ini memang dipenuhi dengan latar belakang budaya yang berbeda dari masyarakat. Namun, kita selalu menggelar musyawarah untuk mengatasi seluruh konflik yang terjadi di masyarakat. Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya juga dapat menjadi ajang pemersatu keharmonisan diantara masyarakat dimana pemerintah desa melibatkan seluruh masyarakat desa dalam setiap program yang ada”

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan berdasarkan wawancara bahwa tidak adanya pembeda-beda latar belakang budaya yang dilakukan oleh pemerintah desa menjadi satu hal langkah yang dilakukan guna mengatasi konflik pada masyarakat, selain itu dengan adanya tanggapan cepat atau bantuan

pemerintah desa sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian masalah dalam diadakannya musyawarah desa menjadi satu langkah yang dan peran pemerintah desa dalam hal ini. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat juga bahwa program pemberdayaan masyarakat desa yang diadakan oleh pemerintah desa menjadi salah satu ajang pemersatu keharmonisan dari masyarakat itu sendiri.

Budaya berpolitik lainnya yang terjadi pada Desa Fadoro Fulolo dimana hal tersebut menyebabkan adanya kesalahan efeksi yang terjadi. Kesalahan efeksi merupakan sebuah tindakan tidak menyenangkan yang disebabkan oleh seorang atau sebuah kelompok. Pada Desa Fadoro Fulolo kesalahan efeksi tersebut juga terjadi yang dimana hal tersebut berasal dari adanya budaya berpolitik masyarakat desa yang tidak bersih atau tidak baik, hal tersebut disebabkan dari adanya budaya politik mobilisasi secara tertutup yang dimana masing-masing calon melakukan penggiringan opini kepada masyarakat. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan ketertinggungan atau persaingan yang tidak sehat antar pasangan calon kepala desa. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa budaya politik tersebut menyebabkan adanya tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan masing-masing kelompok calon kepala desa untuk menggiring opini masyarakat. Seperti melakukan penggiringan opini publik yang dilakukan oleh calon kepala desa dari dusun III yang menggiring opini bahwa calon kepala desa dari dusun I merupakan pihak yang suka mengonsumsi alkohol.

Maka yang menjadi kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas Pemerintahan Desa memberi bantuan kepada masyarakat untuk mengatasi konflik ketika terjadinya masalah, agar masyarakat desa tetap bersatu, harmoni dan tidak terjadi kesalahan paham satu dengan yang lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan efeksi yang terjadi pada Desa Fadoro Fulolo ditimbulkan oleh adanya kesalahan komunikasi yang terjadi dari adanya perpecahan dalam kelompok adat yang ada sehingga menimbulkan kesalahan efeksi atau perbuatan tidak menyenangkan. Peran pemerintah Desa Fadoro Fulolo dalam menangani konflik budaya yang terjadi dari adanya tindakan kesalahan efeksi tersebut adalah dengan tidak membedakan latar belakang budaya yang ada pada masyarakat Desa Fadoro Fulolo, dan juga

memberikan atau melaksanakan kegiatan yang menciptakan keharmonisan masyarakat desa dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan PKK dan lain sebagainya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Ilma Wati.D (2020) pada penelitiannya yang berjudul **Kesadaran Multikultural Terhadap Konflik Mahasiswa Melalui Pendekatan Etnopedagogi (Studi Kasus Terhadap Mahasiswaunismuh Makassar)** mengatakan bahwa kesalahan dalam efeksi biasanya sebuah bentuk perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang karena ingin memberitahu atau melampiaskan rasa ketidaknyamanan atau ketidakadilan yang dirasakannya dari sebuah konflik.

No.	Indikator	Peran Pemerintah
1.	Kesalahan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi secara tertulis dengan menggunakan dua bahasa yakni bahasa daerah Nias dan juga bahasa Indonesia sehingga mengurangi kesalahan komunikasi yang terjadi. 2. Menggunakan bantuan kepala dusun masing-masing untuk menyampaikan informasi.
2.	Perbedaan tujuan	Pemerintah Desa dengan adil menampung seluruh aspirasi dan pendapat maupun harapan masyarakat.
3.	Perbedaan penilaian atau persepsi	Pemerintah Desa siap melakukan atau ikut serta dalam musyawarah yang diadakan oleh masyarakat apabila masyarakat membutuhkan pemerintah desa dalam mencari jalan solusi bagi konflik yang terjadi pada masyarakat.
4.	Interpendensi aktifitas kerja	1. Pemerintah mendukung penuh program sistem keamanan lingkungan yang dilakukan guna menjaga lingkungan desa agar tetap aman dan nyaman.

		2. Pemerintah desa melakukan peran dalam menagatasi konflik dari adanya interpendesni dari kelompok adat yang bersitenggang.
5.	Kesalahan ekefsi	<p>1. pemerintah desa menjadi satu hal langkah yang dilakukan guna mengatasi konflik pada masyarakat, selain itu dengan adanya tanggapan cepat atau bantuan pemerintah desa sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian masalah dalam diadakannya musyawarah desa menjadi satu langkah yang dan peran pemerintah desa dalam hal ini.</p> <p>2. Menjalin kerjasama dengan TNI (BABINSA) dan POLRI (BHABINKAMTIBMAS) dalam hal ini guna membantu menangani konflik dan mencegah terjadinya kejadian tindak pidana didalam desa.</p>

4.2.2 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara

Beberapa hal di bawah ini yang merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo kec. Lotu Kab. Nias Utara yang ditemui oleh peneliti.

4.2.2.1 Salah Pengertian

Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Fadoro Fulolo yang didominasi oleh masyarakat Nias Utara memiliki kekurangan dalam penggunaan dan pemahaman akan bahasa Indonesia yang benar sehingga masih mengakibatkan kesalah pahaman atau kesalah penafsiran arti yang disebutkan. Dari kekurangan

yang terjadi pada desa tersebut yang mengakibatkan kesalah pahaman dan kesalahan dalam penafsiran menjadi salah satu faktor terjadi konflik budaya pada Desa Fadoro Fulolo, yang menyebabkan ketersinggungan antar masyarakat yang berasal dari kesalahan pengertian akan bahasa yang disampaikan. Selain itu adanya unsur kesalah pahaman dan ego serta rasa kepemimpinan dari masing-masing kelompok adat yang mengakibatkan konflik budaya yang semakin memanas.

4.2.2.2 Perbedaan Tujuan

Konflik budaya pada Desa Fadoro Fulolo dari faktor perbedaan tujuan karena adanya kesalah pahaman yang terjadi mengenai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dengan yang dilaksanakan dari program pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga menimbulkan penafsiran yang salah akan masyarakat desa. Perbedaan tujuan yang ada yakni mulai dari perbedaan harapan tujuan dari program pembangunan desa yang dimana sebagian masyarakat mengharapkan tujuan pembangunan desa lebih kepada pembangunan infrastruktur dan sebagian lainnya kepada pembangunan fasilitas penunjang kesehatan masyarakat, akan tetapi tidak ada masyarakat yang dapat menghibahkan tanahnya untuk pembangunan. Perbedaan tujuan tersebut mengakibatkan adanya konflik yang menyinggung budaya dari masing-masing masyarakat yang terlibat dalam konflik. Sehingga perbedaan tujuan tersebut juga merupakan salah satu penyebab atau faktor terjadinya konflik budaya pada Desa Fadoro Fulolo.

4.2.2.3 Rebutan atau Persaingan

Salah satu faktor konflik budaya yang terjadi pada Desa Fadoro Fulolo salah satunya adalah adanya perebutan kekuasaan adat yang berujung dengan adanya konflik budaya dari adanya masalah ketersinggungan masyarakat dari masing-masing kelompok, hal ini peneliti duga diakibatkan dari adanya rasa ego atau rasa tidak ingin berbagi kekuasaan sehingga menyebabkan konflik budaya. Konflik budaya tersebut terbentuk dari adanya faktor perebutan kekuasaan adat yang terjadi diantara masyarakat namun turut menyinggung latar belakang budaya

yang berbeda sehingga menyebabkan ketersinggungan yang menciptakan konflik budaya.

4.2.2.4 Masalah wewenang dan tanggung jawab

Konflik budaya yang dibebankan dari adanya pelemparan tanggung jawab dari masing-masing kelompok adat, konflik ini dilatar belakangi oleh terpecahnya dua kelompok adat pada Desa Fadoro Fulolo yang mengakibatkan terjadinya perpecahan pada masyarakat yang mengakibatkan terciptanya kelompok-kelompok pada masyarakat. Kurangnya sikap tegas pemerintah desa disebabkan dari adanya perpecahan kelompok adat tersebut diakui sangat mengganggu masyarakat. Kendala dari masyarakat yang kurang akur atau kurang solid dalam menjalankan aktifitas dan kegiatan yang menyangkut dengan adat terbawa pada kegiatan sehari-hari masyarakat.

4.2.2.5 Penafsiran yang berbeda

Salah satu faktor terjadinya konflik budaya dalam masyarakat Desa Fadoro Fulolo tercipta dari adanya kesalahan penafsiran masyarakat desa akan terciptanya kelompok-kelompok masyarakat yang menolak program pembangunan desa yang dijalankan sehingga mengakibatkan ketegangan dalam Desa Fadoro Fulolo yang menciptakan ketersinggungan budaya dari kebudayaan yang berbeda dan juga perbedaan pilihan dalam menentukan kelompok adat yang digunakan, dari adanya kesalahan penafsiran menyinggung akan budaya oleh masyarakat desa, hal ini terjadi akibat adanya ketegangan antar masyarakat.

4.2.2.6 Pelecehan pribadi dan kedudukan

Faktor terjadinya pelecehan pribadi yang menyebabkan konflik budaya pada Desa Fadoro Fulolo diakibatkan dari adanya kurang pengertian dan pengetahuan bagaimana masyarakat akan adanya perbedaan budaya yang dimiliki dan toleransi akan perbedaan tersebut. Kekurangan tersebut menjadi bagian peran dalam pemerintah desa dalam menanganinya dengan cara melakukan kerjasama dengan TNI dalam memberikan pemahaman akan solidaritas, bela Negara

maupun Nilai dari Pancasila. Dan adapun peran dari pemerintah desa lainnya dengan membantu membangun atau memperbaiki kesalah pahaman dan membantu menengahi permasalahan atau konflik yang terjadi antar masyarakat.

4.2.3 Upaya-upaya Pemerintah Desa dalam mengatasi terjadinya konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara

Konflik budaya merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Konflik antar budaya dapat diartikan sebagai konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap identitas satu kelompok pendukung kebudayaan tertentu terhadap pendukung kebudayaan yang lain dan sistem pendistribusian sumber daya tertentu.

Berdasarkan hasil rumusan masalah kedua yang dimana peneliti mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo perlu dijelaskan lebih jelas bahwa garda terdepan dalam penanganan permasalahan atau konflik budaya yang terjadi pada Desa Fadoro Fulolo ialah Pemerintahan Desa, untuk itu penjelasan lebih lanjutnya secara lebih luas akan menitik beratkan pada analisa Pemerintahan Desa dalam melakukan strategi dalam mengatasi terjadinya konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo. Berikut ini peneliti akan menjelaskan lebih lanjut strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Fadoro Fulolo dalam mengatasi konflik budaya dalam masyarakat yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 4. 3 Kendala-kendala dalam peran pemerintah mengatasi konflik budaya

No.	INDIKATOR	KENDALA
1	Kesalahan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam membantu menyelesaikan konflik budaya yang terjadi. 2. Masih banyaknya masyarakat desa yang tidak dapat mengerti dan menggunakan bahasa Indonesia yang

		baik dan benar.
2.	Perbedaan tujuan	Terdapat perbedaan tujuan masyarakat yang terbagi atas tujuan pembangunan desa kearah infrastruktur dan kearah fasilitas kesehatan.
3.	Interpendesi kerja	Adanya pelemparan tanggung jawab akan program siskamling yang dimana masyarakat masih belum menyadari pentingnya program tersebut dan tanggung jawab dan kewajiban bersama sebagai masyarakat

Sumber: olahan peneliti (2023)

4.2.3.1 Pendekatan Internal (Pendektan Mikro)

Faktor-faktor internal penyelenggara dari Pemerintahan Desa Fadoro Fulolo dari aspek regulasi pembinaan masyarakat di Desa Fadoro Fulolo. Beberapa faktor tersebut digunakan untuk mengawasi tingkat berhasil atau tidaknya penenagan konflik budaya pada masyarakat Desa Fadoro Fulolo. Aspek internal pihak yang bertanggung jawab dalam mengatasi konflik budaya yang terjadi pada desa adalah pemerintahan desa yang merumuskan kebijakan terkait pembinaan masyarakat sebagai alat pelaksana bagi pemerintahan desa dalam menciptakan Desa Fadoro Fulolo yang aman, nyaman, dan kondusif.

1. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas manajemen pada Pemerintah Desa Fadoro Fulolo dengan, dilakukanya monitoring pada kegiatan masyarakat yang mengundang atau melibatkan banyak masyarakat, sehingga dapat melakukan pencegahan, dapat menyiapkan atau mengantisipasi terjadinya konflik budaya. Pengawasan terhadap masyarakat yang dimaksudkan adalah pengawasan dalam hal kegiatan yang dilaksanakan masyarakat dalam lingkungan masyarakat, dan program pemberdayaan yang diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengawasan ini sangatlah penting untuk dilakukan karena untuk saat

ini masih terdapat beberapa kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan namun tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan pemerintah desa. Misalnya adalah kegiatan pemuda yang menyelenggarakan kegiatan kumpul-kumpul yang melibatkan banyak masyarakat. Kegiatan pemuda tidak dilakukan pemberitahuan kepada pemerintah desa dalam melaksanakannya, namun kegiatan tersebut melibatkan banyak masa (lebih dari 20 orang) dan menyangkut dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat disekitarnya. Kegiatan seperti itu seharusnya disimpulkan berdasarkan wawancara dan mendapat izin dari pemerintah desa, baik dari kepala dusun atau RW/RT sehingga segala dampaknya dapat diatasi dan dipertimbangkan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa diharapkan dalam hal ini lebih tanggap dalam melihat kegiatan masyarakat yang tidak mengandung izin dan pemberitahuan, untuk segera diambil tindakan pembubaran jika membawa dampak negative dan sebaliknya. Sehingga dampak yang diaibatkan oleh kegiatan tersebut lebih dapat diatasi, termasuk dari munculnya dampak konflik mengenai budaya.

2. Pemberdayaan masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik budaya dengan cara:
 - a. Mengadakan pertemuan atau musyawarah yang bersifat formal yang pada pertemuan ini mempermudah masyarakat dalam bertukar informasi dengan mudah dengan diakomodasi oleh Kepala Dusun masing-masing, dan juga dengan memberikan atau melakukan pertukaran informasi dengan menggunakan dua bahasa yang dapat dimengeerti oleh seluruh masyarakat desa yakni bahasa Indonesai dan bahasa Daerah Nias, sehingga informasi dan komunikasi yang terjalin dapat menjadi efektif.
 - b. Pemerintah desa akan menampung musyawarah yang diadakan oleh masyarakat apabila masyarakat membutuhkan pemerintah desa dalam mencari jalan solusi bagi konflik yang terjadi.
 - c. Pemerintah desa melakukan peran dalam menagatasi konflik dari adanya interpendesni kerja yang terjadi dari konflik perpecahan kelompok adat yang terjadi.

- d. Pemerintah Desa Fadoro Fulolo dalam menangani konflik budaya yang terjadi dari adanya tindakan keslaahn efeksi tersebut adalah dengan tidak membeda-bedakan latar belakang budaya yang ada pada masyarakat Desa Fadoro Fulolo, dan juga memberikan atau melakasnakan kegiatan yang menciptakan keharmonisan masyarakat desa dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan PKK dan lain sebagainya.

4.2.3.2 Pendekatan Eksternal (Pendekatan Makro)

Faktor eksternal dari pihak yang mengupayakan mengatasi konflik budaya yang terjadi pada Desa Fadoro Fulolo meliputi pihak yang ikut serta dalam menjalin kerjasama dalam penanganan atau upaya mengtasi konflik budaya tersebut. Aspek eksternal ini tidak bertanggung jawab penuh dalam mengatasi konflik namun hanya ikut serta sebagai pihak yang membantu. Adapun pihak eksternal dan upaya ektseternal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjaln kerjasama dengan pihak eksternal dalam membantu mengatasi konflik budaya atau konflik lainnya yang terjadi pada Desa Fadoro Fulolo yakni dengan:
 - a. Bhabinkamtimbmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk mengetahui program apa saja yang telah dijalan kan dalam mengatasi konflik budaya yang terjadi di Desa Fadoro Fulolo, sebagai Bhabinkamtimbmas kita melakukan kunjungan dari rumah ke rumah masayrakat desa, melakukan dan membnatu pemecahan masalah atau konflik yang terjadi, melakukan tindakan apabila terjadi konflik yang melibatkan tindak pidana, memberikan perlindungan sementara kepada masyarakat, dan memberikan pentunjuk kepada masyarakat atau pemerintahan desa yang berkaitan dengan permasalahan yang melibatkan kantibmas dan pelayanan Polri
 - b. Babinsa (Bintara Pembina Desa) untuk mengetahui peran dari Babinsa dalam mengatasi konflik budaya: Dari Babinsa sendiri kita akan melakukan penyuluhan tentang kesadaran bela Negara

dan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat, memberikan penyuluhan tentang pembangunan masyarakat desa dibidang pertahanan keamanan Negara, melakukan pengawasan dalam kegiatan masyarakat dan memberikan laporan kepada Pemerintahan Desa tentang kondisi sosial pedesaan secara berkala

2. Melakukan pemerataan dan persamaan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan adanya perlakuan yang sama akan pelayanan kepada masyarakat sehingga mencegah dan mampu mengatasi konflik budaya yang ada. Kurangnya pengetahuan dan masih banyaknya masyarakat yang belum bisa menerima perbedaan menjadi salah satu kelemahan dalam mengatasi konflik budaya pada Desa Fadoro Fulolo. Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan yang merata dan layak juga menjadi salah satu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perbedaan agama, budaya dan suku dari setiap individu. Selain itu pemerintah desa dalam hal ini seharusnya mengatasi kelemahan ini dengan memberikan lebih banyak dan mengajak masyarakat lebih banyak untuk mengikuti pelatihan bela Negara dan juga nilai pancasila yang diadakan oleh Banbinsa. Sehingga masyarakat lebih mengerti akan nilai perbedaan dan saling menjaga keutuhan dalam bermasyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Desa Fadoro Fulolo dalam mengatasi konflik budaya
Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Fadoro Fulolo dalam menyelesaikan konflik antarmasyarakat dan mencegah terjadinya konflik budaya pada masyarakat yakni sebagai sebagai berikut:
 - a. Kesalahan keomunikasi:
 1. Memberikan informasi secara tertulis dengan menggunakan dua bahasa yakni bahasa daerah Nias dan juga bahasa Indonesia sehingga mengurangi kesalahan komunikasi yang terjadi.
 2. Menggunakan bantuan kepala dusun masing-masing untuk menyampaikan informasi.
 - b. Perbedaan tujuan: Pemerintah Desa dengan adil menampung seluruh aspirasi dan pendapat maupun harapan masyarakat.
 - c. Perbedaan penilaian atau persepsi: Pemerintah Desa siap melakukan atau ikut serta dalam musyawarah yang diadakan oleh masyarakat apabila masyarakat membutuhkan pemerintah desa dalam mencari jalan solusi bagi konflik yang terjadi pada masyarakat.
 - d. Interpedensi kerja:
 1. Pemerintah mendukung penuh program sistem keamanan lingkungan yang dilakukan guna menjaga lingkungan desa agar tetap aman dan nyaman.
 2. Pemerintah desa melakukan peran dalam mengatasi konflik dari adanya interpedesni kerja yang terjadi dari program siskamling dengan membuka keluhan, serta peluang bagi masyarakat yang ingin menawarkan diri sebagai petugas dari

siskamling itu sendiri

e. Kesalahan efeksi:

1. Pemerintah desa menjadi satu hal langkah yang dilakukan guna mengatasi konflik pada masyarakat, selain itu dengan adanya tanggapan cepat atau bantuan pemerintah desa sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian masalah dalam diadakannya musyawarah desa menjadi satu langkah yang dan peran pemerintah desa dalam hal ini.
 2. Menjalin kerjasama dengan TNI (BABINSA) dan POLRI (BHABINKAMTIBMAS) dalam hal ini guna membantu menangani konflik dan mencegah terjadinya kejadian tindak pidana didalam desa.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara adalah:
- a. **Kesalahan pengertian**, kurangnya pemahanan masyarakat Desa Fadoro Fulolo yang didominasi oleh masyarakat Nias Utara memiliki kekurangan dalam penggunaan dan pemahaman akan bahasa Indonesia yang benar sehingga masih mengakibatkan kesalahpahaman atau kesalah penafsiran arti yang disebutkan. Dari kekurangan yang terjadi pada desa tersebut yang mengakibatkan kesalah pahaman dan kesalahan dalam penafsiran menjadi salah satu faktor terjadi konflik budaya pada Desa Fadoro Fulolo, yang menyebabkan ketersinggungan antar masyarakat yang berasal dari kesalahan pengertian akan bahasa yang disampaikan. Selain itu adanya unsur kesalahpahaman dan ego serta rasa kepemimpinan dari masing-masing kelompok adat yang bersitegang mengakibatkan konflik budaya yang semakin memanas.
 - b. **Perbedaan tujuan**, terjadinya konflik budaya pada Desa Fadoro Fulolo dari faktor perbedaan tujuan karena adanya kesalah pahaman yang terjadi mengenai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dengan yang dilaksanakan dari program pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga menimbulkan penafsiran yang salah akan masyarakat desa yang bukan masyarakat

lokal. Perbedaan tujuan yang ada yakni mulai dari perbedaan harapan tujuan dari program pembangunan desa yang dimana sebagian masyarakat mengharapkan tujuan pembangunan desa lebih kepada pembangunan infrastruktur dan sebagian lainnya kepada pembangunan fasilitas penunjang kesehatan masyarakat. Perbedaan tujuan tersebut mengakibatkan adanya konflik yang menyinggung budaya dari masing-masing masyarakat yang terlibat dalam konflik. Sehingga perbedaan tujuan tersebut juga merupakan salah satu penyebab atau faktor terjadinya konflik budaya pada Desa Fadoro Fulolo.

- c. **Rebutan atau persaingan**, salah satu faktor konflik budaya yang terjadi pada Desa Fadoro Fulolo salah satunya adalah adanya perebutan kekuasaan adat yang berujung dengan adanya konflik budaya dari adanya masalah ketersinggungan masyarakat dari masing-masing kelompok, hal ini peneliti duga diakibatkan dari adanya rasa ego atau rasa tidak ingin berbagi kekuasaan sehingga menyebabkan konflik budaya. Konflik budaya tersebut terbentuk dari adanya faktor perebutan kekuasaan adat yang terjadi diantara masyarakat namun turut menyinggung latarbelakang budaya yang berbeda sehingga menyebabkan ketersinggungan yang menciptakan konflik budaya.
- d. **Masalah wewenang dan tanggung jawab** bahwa konflik budaya yang dibebankan dari adanya pelemparan tanggung jawab dari masing-masing kelompok adat, konflik ini dilatar belakangi oleh terpecahya dua kelompok adata pada Desa Fadoro Fulolo yang mengakibatkan terjadinya perpecahan pada masyarakat yang mengakibatkan terciptanya kelompok-kelompok pada masyarakat. Kurangnya sikap tegas pemerintah desa disebabkan dari adanya perpecahan elompok adat tersebut diakui sangat mengganggu masyarakat. Kendala dari masyarakat yang kurang akur atau kurang solid dalam menjalankan aktifitas dan kegiatan yang menyangkut dengan adat terbawa pada kegiatan sehari-hari masyarakat.

e. **Penafsiran yang berbeda**, salah satu faktor terjadinya konflik budaya dalam masyarakat Desa Fadoro Fulolo tercipta dari adanya kesalahan penafsiran masyarakat desa akan terciptanya kelompok-kelompok masyarakat yang menolak program pembangunan desa yang dijalankan sehingga mengakibatkan ketegangan dalam Desa Fadoro Fulolo yang menciptakan kertesinggungan budaya dari kubu dyang berbeda dan juga perbedaan pilihan dalam menentukan kelompok adat yang digunakan, dari adanya kesalahan penafsiran menyinggung akan budaya oleh masyarakat desa, hal ini terjadi akibat adanya ketegangan antar masyarakat.

3. Upaya- upaya Pemerintah Desa dalam mengatasi terjadinya konflik budaya di Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara adalah:

a) **Pendekatan internal (Mikro)**

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas manajemen pada Pemerintah Desa Fadoro Fulolo dengan, dilakukanya monitoring pada kegiatan masyarakat yang mengundang atau melibatkan banyak masyarakat atau massa didalamnya, sehingga dapat melakukan pencegahan atau dapat menyiapkan atau mengantisipasi terjadinya konflik budaya.
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat seperti: Melakukan pertemuan atau musyawarah, pemerintah desa menampung semua aspirasi dan keluhan, tidak membedakan jabatan, latar belakang budaya masyarakat.

b) **Pendekatan eksternal (Makro)**

1. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam membantu mengatasi konflik budaya atau konflik lainnya yang terjadi pada Desa Fadoro Fulolo Bhabinkamtimbmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) sebagai Bhabinkamtimbmas kita melakukan kunjungan dari rumah ke rumah masyarakat desa, melakukan dan membntu pemecahan masalah atau konflik yang terjadi, melakukan tindakan apabila terjadi konflik yang melibatkan tindak pidana, memberikan

perlindungan sementara kepada masyarakat, dan memberikan petunjuk kepada masyarakat atau pemerintahan desa yang berkaitan dengan permasalahan yang melibatkan kantibmas dan pelayanan Polri Babinsa (Bintara Pembina Desa) untuk mengetahui peran dari Babinsa dalam mengatasi konflik budaya: Dari Babinsa sendiri kita akan melakukan penyuluhan tentang kesadaran bela Negara dan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat, memberikan penyuluhan tentang pembangunan masyarakat desa dibidang pertahanan keamanan Negara, melakukan pengawasan dalam kegiatan masyarakat dan memberikan laporan kepada Pemerintahan Desa tentang kondisi sosial pedesaan secara berkala

2. Melakukan pemerataan dan persamaan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan adanya perlakuan yang sama akan pelayanan kepada masyarakat sehingga mencegah dan mampu mengatasi konflik budaya yang ada. Kurangnya pengetahuan dan masih banyaknya masyarakat yang belum bisa menerima perbedaan menjadi salah satu kelemahan dalam mengatasi konflik budaya pada Desa Fadoro Fulolo.

5.2 Saran

- a. Pemerintah Desa Fadoro Fulolo sebaiknya menyiapkan rancangan dalam mengatasi konflik budaya yakni dari adanya perpecahan kelompok adat yang ada pada Desa Fadoro Fulolo, yang dimana peneliti melihat bahwa permasalahan atau konflik tersebut tak kunjung selesai pada tangan penghulu adat dan Pemerintah Desa Fadoro Fulolo sebaiknya turun tangan, sehingga konflik tersebut tidak mengganggu aktifitas masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat
- b. Pemerintah Desa Fadoro Fulolo sebaiknya lebih meningkatkan peran pemerintah dalam mengatasi adanya ikut serta dalam musyawarah yang diadakan oleh masyarakat apabila masyarakat membutuhkan pemerintah

desa dalam mencari jalan solusi bagi konflik yang terjadi pada masyarakat.

- c. Pemerintah Desa Fadoro Fulolo sebaiknya meningkatkan dan menjaga kerjasama yang terjalin dengan TNI (BABINSA) dan POLRI (BHABINKAMTIBMAS) dalam hal ini guna membantu menangani konflik dan mencegah terjadinya kejadian tindak pidana didalam desa.

"STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGATASI KONFLIK BUDAYA DI DESA FADORO FULOLO KEC. LOTU KAB. NIAS UTARA"

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	11%
2	repository.uma.ac.id Internet Source	5%
3	www.kampungbaru.go.id Internet Source	2%
4	keblukan-kaloran.temanggungkab.go.id Internet Source	2%
5	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to kopusat.turnitin@gmail.com Student Paper	1%
8	pn-gunungsitoli.go.id Internet Source	1%

repository.unugha.ac.id

9

Internet Source

1 %

10

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

1 %

11

pasirawasigli.blogspot.com

Internet Source

1 %

12

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

1 %

13

jurnal.umsrappang.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

"STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGATASI KONFLIK BUDAYA DI DESA FADORO FULOLO KEC. LOTU KAB. NIAS UTARA"

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94
